

IMPLIKASI HUKUM PROSES VALIDASI
INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY
(IMEI) TERHADAP *SMARTPHONE* ILEGAL



SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Strata 1 dalam Ilmu Hukum

Oleh:

ERVINE YUMITVAMIATI PUTRI

NPM: 5117500045

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

2021

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
IMPLIKASI HUKUM PROSES VALIDASI *INTERNATIONAL MOBILE*
***EQUIPMENT IDENTITY* (IMEI) TERHADAP *SMARTPHONE* ILEGAL**

Ervine Yumitvamiati Putri

NPM 5117500045

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Dr. H. Sanusi, S.H., M.H.
NIDN 0609086202

Tegal, 25 Januari 2021

Pembimbing II



Imam Asmarudin, S.H., M.H.
NIDN 0625058106

Mengetahui

Dekan,



Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.
NIDN 0615067604

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLIKASI HUKUM PROSES VALIDASI *INTERNATIONAL MOBILE
EQUIPMENT IDENTITY* (IMEI) TERHADAP *SMARTPHONE* ILEGAL**

Ervine Yumitvamiati Putri

NPM 5117500045

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh

Tegal, 25 Januari 2021

Penguji I



Fajar Dian Aryani, S.H., M.H.
NIDN 0608087702

Penguji II



Tiwas Vika Widyastuti, S.H., M.H.
NIDN 0619058703

Pembimbing I



Dr. H. Sanusi, S.H., M.H.
NIDN 0609086202

Pembimbing II



Imam Asmarudin, S.H., M.H.
NIDN 0625058106

Mengetahui

Dekan,



Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.
NIDN 0615067604

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ervine Yumitvamiati Putru
NPM : 5117500045
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 30 Mei 1999
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **IMPLIKASI HUKUM PROSES VALIDASI
INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT
IDENTITY(IMEI) TERHADAP SMARTPHONE
ILEGAL**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 25 Januari 2021

Yang Menyatakan


(Ervine Yumitvamiati Putri)

Abstrak

Tingginya angka peredaran *smartphone* ilegal di Indonesia menunjukkan bahwa penegakan hukum belum terlaksana dengan baik. Melalui pendekatan teknologi pemerintah menciptakan sebuah produk hukum berupa pengaturan validasi *international mobile equipment identity* (IMEI) guna menekan angka peredaran *smartphone* ilegal di Indonesia. Kurangnya pemahaman terhadap pengaturan tersebut atas akibat hukum yang ditimbulkan menuai pro dan kontra.

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mendeskripsikan pengaturan terhadap larangan peredaran *smartphone* ilegal di Indonesia dan (2) untuk mendeskripsikan Implikasi Hukum Proses Validasi *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) terhadap *Smartphone* Ilegal. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan teknik pengumpulan datanya melalui metode kepustakaan (*library reseacrh*) dan dianalisis dengan metode analisis data secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum diberlakukanya regulasi validasi *international mobile equipment identity* (IMEI) belum adanya pengaturan secara spesifik terkait larangan peredaran *smartphone* ilegal Indonesia sehingga peredaran *smartphone* ilegal masih banyak celah untuk melakukan sebuah pelanggaran. Implikasi hukum dari pengaturan validasi IMEI, pada *smartphone* ilegal akan dikenakan blokir sistem melalui proses *device identification, registration, and blocking system* (DIRBS) yang resmi diberlakukan pada tanggal 18 April 2020.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan referensi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum universitas Pancasakti Tegal.

Kata Kunci: Implikasi hukum, *Smartphone* ilegal, IMEI.

Abstract

The high number of illegal smartphone circulation in Indonesia shows that law enforcement has not been implemented properly. Through a technological approach, the government creates a legal product in the form of a validation arrangement for the international mobile equipment identity (IMEI) to reduce the number of illegal smartphone circulation in Indonesia. Lack of understanding of the regulation regarding the legal consequences it generates pros and cons.

This study aims (1) to describe the regulations on the prohibition of illegal smartphone circulation in Indonesia and (2) to describe the legal implications of the *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) validation process for illegal smartphones. The approach used is a normative approach with data collection techniques through the library research method (library research) and analyzed by qualitative data analysis methods.

The results of this study indicate that prior to the enactment of the *international mobile equipment identity* (IMEI) validation regulations there were no specific regulations regarding the prohibition of illegal circulation of Indonesian smartphones so that the circulation of illegal smartphones still had many loopholes to commit an offense. The legal implication of the IMEI validation arrangement is that illegal smartphones will be subject to a system block through the device identification, registration, and blocking system (DIRBS) processes which were officially enforced on April 18, 2020.

Based on the results of this research, it is hoped that it will become a reference and input for students, academics, practitioners, and all those in need in the Faculty of Law, Pancasakti Tegal University.

Keywords: Legal implications, illegal smartphones, IMEI.

PERSEMBAHAN

Sujud Syukur kusembahkan kepada-Mu Ya Allah, Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Atas Izin-Mu saya bisa menjadi pribadi yang berfikir, berilmu, beriman, jujur dan sabar. Semoga Keberhasilan ini menjadi satu langka awal untuk masa depanku, dalam meraih cita-cita:

Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk:

- ❖ Terima kasih untuk diri saya yang telah kuat melewati titik terberat sebagai mahasiswi dengan tetap sehat dan penuh semangat.
- ❖ Terima kasih untuk Bapakku Sumito, S.AP., M.M. dan Ibuku Taryuni. Terima kasih atas kasih sayang yang berlimpah dari mulai saya lahir hingga saat ini, serta atas limpahan motivasi dan doa yang tidak ada hentinya.
- ❖ Terima kasih kakakku Evrike Mityuniani Putri, S.E. dan adikku Abiem Mityunialdi Syahputra yang selalu mendoakan dan mendukungku dengan sabar hingga saat ini.
- ❖ Terima Kasih rekan kuliah Berliana Gina Saputri, Sabrina Romis, Rizqi Safira, Dessy Pramita serta rekan-rekan kelas B yang selalu memberi dorongan dan semangat tanpa henti.
- ❖ Terima Kasih kepada rekan seperjuangan Donny is Prawiranata, Berliana Gina Saputri, Rosiska Chaerunisa Herbani, dan Tashya Baasithu Pamungkas yang telah memberikan semangat dan saling menguatkan pada saat proses penulisan skripsi.
- ❖ Terimakasih kepada sahabat karibku Amalia Dwika, Anisatul Azizah, Dwi Indah, Liya Faizatul, Marwah Ultraningrum, Sinta Eka, Yulia Nur Islamiati yang telah memberikan doa, dukungan, serta motivasi.
- ❖ Terimakasih Kepada Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal angkatan 2017 yang selalu berbagi ilmu yang bermanfaat serta pengalaman yang luar biasa.
- ❖ Terima kasih untuk seluruh pihak yang terkait atas selesainya penulisan skripsi ini.

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan orang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”

(Q.S Al-Insyirah 6-8)

“Dimanapun engkau berada selalulah menjadi yang terbaik dan berikan yang terbaik dari apa yang bisa kita berikan”

(B.J. Habibie)

“Do it according to your principles, if you think it’s right why not? However, you still have to comply with the norms that apply, or you will lose”

(Han Joon Won-True Beauty 2020)

“Just like how countless stars always stay in the same sport, your’ll shine brightly on your own”

(Do Kyung-soo)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur khadirat Allah SWT Alhamdulillah skripsi ini dapat selesai. Dengan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah SAW yang membawa rahmat untuk kita semua.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

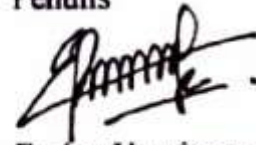
1. Rektor Universitas Pancasakti Tegal Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd.
2. Dekan Fakultas Hukum Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I.,M.Ag.
3. Wakil Dekan I Kanti Rahayu, S.H., M.H.
4. Wakil Dekan II H. Toni Haryadi, S.H., M.H.
5. Wakil Dekan III Imam Asmarudin, S.H., M.H.
6. Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal Tyas Vika Widyastuti, S.H., M.H.
7. Dosen Pembimbing I Dr. H. Sanusi, S.H., M.H dan Dosen Pembimbing II Imam Asmarudin, S.H., M.H. yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulisan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Strata 1. Mudah-mudahan mendapat balasan dari Allah SWT sebagai amal shalil.
9. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.
10. Orang tua, serta saudara-saudara penulis yang memberikan dorongan moriil pada penulis dalam menempuh studi.

11. Kawan-kawan penulis, dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-satu.

Semoga Allah Swt. membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya Allah Swt. penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, Januari 2021

Penulis



Ervine Yumitvamiati Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Rencana Sistematika Penelitian	18
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL.....	19
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum	19
1. Pengertian Hukum	19
2. Subjek dan Objek Hukum	22
3. Sumber Hukum.....	23
4. Pengertian Penegakan Hukum.....	25
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Smartphone</i>	28
1. Pengertian <i>Smartphone</i>	28
2. Pengertian Legal dan Ilegal.....	31
3. Pengaturan Peredaran <i>Smartphone</i> di Indonesia	34
4. Dampak Negatif Peredaran <i>Smartphone</i> Ilegal	40
C. Tinjauan Umum tentang <i>Internatiaonal Mobile Equipment Identity</i> (IMEI)	42
1. Pengertian <i>Internatiaonal Mobile Equipment Identity</i> (IMEI)	42
2. Fungsi <i>Internatiaonal Mobile Equipment Identity</i> (IMEI)	44

3. Pengaturan <i>Internasional Mobile Equipment identity</i> (IMEI) di Indonesia.....	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Pengaturan Terhadap Larangan Peredaran <i>Smartphone</i> Ilegal di Indonesia	50
B. Implikasi Hukum Proses <i>Validasi International Mobile Equipment Identity</i> (IMEI) Terhadap <i>Smartphone</i> Ilegal	69
BAB IV PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	90
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dikatakan sebagai negara hukum dimana suatu negara yang dalamnya terdapat aspek-aspek peraturan yang bersifat memaksa dan memiliki sanksi tegas. Hukum sendiri diartikan sebagai diartikan sebagai tata aturan yang mengatur perilaku manusia dalam bermasyarakat dan bersifat memaksa, yang artinya bahwa seluruh tatanan tersebut berakibat terhadap peristiwa-peristiwa tertentu dan dianggap sebagai suatu yang tidak dikehendaki karena merugikan masyarakat. Dampak tersebut terutama ditujukan terhadap perilaku manusia yang merugikan, dengan menggunakan tindakan paksa. Hukum memiliki sebuah tujuan yakni untuk terpelihara dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban.

Dalam mewujudkan suatu tujuan hukum perlu adanya penegakan terhadap hukum. Penegakan hukum yang dimaksud yakni aktifitas/ atau kegiatan menyeraskan sebuah hubungan nilai-nilai yang di jabarkan dalam kaidah-kaidah yang tepat serta tindakan sebagai rangkaian akhir guna menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹ Tingkat perkembangan masyarakat sebagai tempat diberlakukannya sebuah hukum/ aturan sangat berpengaruh dalam pola penegakan

¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 5.

hukum. Dalam teorinya Max Weber beranggapan bahwa penegakan hukum kerap mengalami pembaharuan dari masa ke masa sebab perkembangan sosial dari masyarakatnya, hal tersebut bertujuan supaya suatu penegakan hukum dapat di selenggarakan ketika keadaan sedang membutuhkan.² Permasalahan penegakan hukum merujuk pada peraturan yang tidak berfungsi sebagai mana mestinya, sehingga belum efektif dalam menyelesaikan sebuah kasus.

Permasalahan penegakan hukum di indonesia salah satunya adalah pada penanganan peredaran *smartphone* ilegal. *Smartphone* ilegal adalah sebuah produk perangkat telekomunikasi seluler yang tidak terdaftar di Kementerian Perindustrian. Lazimnya untuk dapat diedarkan melalui perdagangan sebuah produk *smartphone* harus melalui beberapa tahapan agar sesuai dengan satandar nasioanal (legal) baik *smartphone* produksi/ atau impor wajib didaftarkan di Kementrian Perindustrian.³ Pendaftaran tersebut mencakup tipe, nomor identitas setiap produk, jumlah yang akan di produksi dan/ atau produk yang akan di import sesuai dengan peraturan Menteri Perindustrian Nomor 108 tahun 2012 tentang Pendaftaran Produk Telepon Seluler, Komputer genggang, Komputer tablet. Pada tahapan pendaftaran produk *smartphone* juga harus melalui tahapan dari sertifikasi perangkat pada *smartphone* diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 tahun 2016 tentang sertifikasi perangkat

² Satjipto Raharjo, op.cit., hlm. 191.

³ Budhijanto Dandrivanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi*, Jakarta: Refika Aditama, 2016. hlm 34.

telekomunikasi pesawat telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet. Apabila barang telah melalui proses tersebut dan dinyatakan lolos maka akan terdaftar di database pemerintah sehingga dapat disebut sebagai smartphone legal atau sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pengaturan mengenai larangan peredaran smartphone ilegal di Indonesia merujuk secara tidak langsung melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Purna Jual Bagi Produk Elektronik dan Telematika dimana disebutkan bahwa bagi produk elektronik dan produk telematika, dimana disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) bahwa:

“Tiap-tiap produk telematika dan elektronika baik yang diproduksi maupun diimpor untuk di perjual belikan dalam negeri wajib dilengkapi dengan kartu jaminan garansi (layanan purna jual) dan petunjuk penggunaan dengan bahasa Indonesia.”

Pada smartphone ilegal tidak dilengkapi dengan kartu garansi distributor resmi sehingga dapat dikatakan melanggar ketentuan peraturan tersebut. dan di jelaskan pada pasal 22 dijelaskan apabila produk perangkat telekomunikasi seluler tidak di dapati kartu garansi dan petunjuk penggunaan maka produsen atau importir wajib melakukan penarikan pada produk tersebut agar tidak beredar di pasaran. Jika di dapati produsen ataupun importir tidak melakukan penarikan pada produk tersebut pada pasal 24 akan dikenakan sanksi administrasi,

“Apabila produsen atau importir melanggar ketentuan dengan tidak melakukan penarikan produk, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha”

Sedangkan di dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan bahwa pada dasarnya konsumen mempunyai hak dalam jual beli perangkat telekomunikasi seluler berupa smartphone yaitu hak untuk mendapatkan keamanan dan informasi yang benar dan jelas.⁴ Tercantum dalam pasal 4 huruf (c) Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang menyebutkan bahwa:

“Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi, jaminan barang atau jasa”.

Hak atas informasi yang jelas sangat penting, karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk, yang dikanal dengan cacat intruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai.⁵ Selain itu juga pada pasal 8 huruf (a) UUPK dijelaskan bahwa:

⁴ Faillasuf Septanu Adivon, *“Penegakan Hukum Terhadap Tindal Pidana Penjualan Telepon Seluler Replika”*, Skripsi Sarjana Hukum, Malang: Perpustakaan Universitas Brawijawa, 2015, hlm. 7.

⁵ Ahmad Miru dan Sutarman Yudo, *“Hukum Perlindungan Konsumen”*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 41.

“Pelaku usaha dilarang memproduksi barang dan/ atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang di persyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.”

Dalam hal ini pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk mematuhi standar produk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi pelaku usaha yang melanggar pasal 8 huruf (a) UUPK akan di kenakan sanksi pidana paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 milyar sesuai dengan pasal 62 huruf (a) UUPK.

Pada penerapan pengaturan tersebut nyatanya belum efektif untuk meredam peredaran *smartphone* ilegal di Indonesia sehingga penegakan hukum guna melindungi pengguna/ konsumen *smartphone* belum sepenuhnya terealisasi dengan baik. Selain lemahnya penegakan hukum juga belum adanya pengaturan yang secara spesifik mengatur larangan peredaran *smartphone* ilegal juga. Sampai saat ini, peredaran *smartphone* ilegal masih beredar bebas di Indonesia. Peredaran *smartphone* ilegal di Indonesia menunjukkan angka 9 (sembilan) sampai 10 (sepuluh) juta unit pertahun dengan total kerugian 2,81 (dua koma delapan pulu satu) triliun pertahun.⁶ Hal tersebut membuktikan bahwa penegakan hukum pada *smartphone* ilegal masih belum berjalan dengan baik sebagai mana mestinya.

⁶ Kementerian Perindustrian, *Perangi Ponsel Ilegal, Tiga Menteri Teken Aturan Bersama*, Siaran Pers KEMENPERIN, <https://kemenperin.go.id/artikel/21160/Perangi-Ponsel-Ilegal,-Tiga-Menteri-Teken-Aturan-Bersama>, Jumat, 18 Oktober 2019.

Melihat kondisi tersebut pemerintah melalui tiga kementerian yakni kementerian komunikasi dan informatika, kementerian perindustrian dan Kementerian Perdagangan resmi memberlakukan 3 (tiga) regulasi terkait validasi *international mobile equipment identity* (IMEI) pada perangkat telekomunikasi yang mencakup telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet (HKT). Validasi *international mobile equipment identity* (IMEI) merupakan pengidentifikasian nomor IMEI pada smartphone melalui pencocokan data *international mobile equipment identity* (IMEI) dengan nomor pendaftaran produk yang telah tersimpan dalam database Kementerian Perindustrian. Regulasi IMEI sebagai pengendalian perangkat telekomunikasi bukanlah hal yang baru dalam industri telekomunikasi. Pasalnya, sudah banyak negara yang telah mengaplikasikan regulasi serupa diantaranya Turki (2006), Mesir (2010), Amerika Serikat (2012), Kenya (2012), Malaysia (2014), dan Pakistan (2018).⁷

Di Indonesia regulasi validasi *International mobile equipment identity* (IMEI) baru diberlakukan pada tanggal 18 April 2020 salah satunya melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 1 tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui

⁷ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Pemerintah Jalankan Blocking Penuh IMEI Perangkat telekomunikasi*, kontan.co.id, <https://amp.kontan.co.id/release/pemerintah-jalankan-blocking-penuh-pengendalian-imei-perangkat-telekomunikasi>, 16 September 2020,

International Mobile Equipment Identity (IMEI). Regulasi validasi IMEI di buat agar masyarakat selaku konsumen/ pengguna perangkat telekomunikasi untuk mendapatkan kepastian hukum atas penegakan hukum pada *smartphone* ilegal melalui validasi IMEI yang mencakup perangkat handphone, komputer genggam, dan komputer tablet (HKT) yang tidak memenuhi syarat teknis/ atau hasil dari kejahatan serta menekan peredaran perangkat telekomunikasi seluler berupa *smartphone* yang dinyatakan ilegal menurut peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu saja regulasi ini juga menyasar tujuan negara untuk mengurangi potensi kerugian negara berupa pajak akibat peredaran perangkat telekomunikasi ilegal. namun, kurang pahamnya masyarakat atas kebijakan pemerintah dalam menekan angka peredaran *smartphone* ilegal melalui validasi *international mobile equipment identity* (IMEI) menjadikan timbul pro dan kontra. Regulasi validasi *international mobile equipment identity* ditakutkan akan mencederai hak-hak konsumen selaku pembeli/ atau pengguna *smartphone* atas pemberlakuan sistem blokir pada *smartphone* ilegal.

Berdasarkan uraian diatas tersebut, maka penulis tertarik untuk mengetahui secara mendalam berkaitan dengan pengaturan *smartphone* ilegal di Indonesia serta implikasi hukum proses validasi *international mobile equipment identity* (IMEI) terhadap *smartphone* ilegal guna memberikan pemahaman kepada masyarakat atas kebijakan pemerintah dalam menekan angka peredaran *smartphone* ilegal di Indonesia, maka

penulis menuangkan ke dalam bentuk penelitian hukum yang berjudul
 “IMPLIKASI HUKUM PROSES VALIDASI *INTERNATIONAL
 MOBILE EQUIPMENT IDENTITY* (IMEI) TERHADAP
SMARTPHONE ILEGAL”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka secara lebih konkret, masalah penelitian yang peneliti dapat rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Terhadap larangan Peredaran *Smartphone* Ilegal di Indonesia?
2. Bagaimana Implikasi Hukum Proses Validasi *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) terhadap *Smartphone* Ilegal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, ada beberapa tujuan yang melandasi penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan pengaturan terhadap larangan peredaran *smartphone* ilegal di Indonesia
2. Untuk mendeskripsikan implikasi hukum proses validasi *international mobile equipment identity* (IMEI) terhadap *smartphone* ilegal

D. Manfaat Penelitian

Pada penyusunan skripsi ini terdapat dua manfaat diantaranya yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kelimuan dalam perkembangan ilmu hukum, yang utamanya berkaitan dengan permasalahan *smartphone* ilegal.
- b. Sebagai persyaratan guna melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok akademis untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis dapat menambah pengetahuan dan pemahaman menggunakan haknya sebagaimana mestinya terutama pada penegakan hukum terhadap *smartphone* ilegal melalui regulasi validasi *International mobile equipment identity* (IMEI).
- b. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk bisa lebih bijak dalam membeli perangkat telekomunikasi seluler jenis *smartphone* agar tidak membeli produk ilegal.

3. Manfaat Akademis

Manfaat akademis yang diharapkan adalah bahwa penelitian dapat dijadikan rujukan bagi pemerintah sebagai upaya pengembangan

pengaturan terkait peredaran perangkat telekomunikasi ilegal melalui validasi *international mobile equipment identity* (IMEI) agar menjadi suatu hukum yang sempurna, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap penegakan hukum smartphone ilegal melalui validasi *international mobile equipment identity* (IMEI).

E. Tinjauan Pustaka

Berikut penulis ilustrasikan/deskripsikan beberapa penelitian terkait dengan Penelitian terkait dengan judul “Implikasi Hukum Proses Validasi *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) terhadap Smartphone Ilegal”, Untuk itu penelitian ini menunjuk dan menghadapkan peneliti yang lain, berikut peneliti paparkan :

Andika Prawira Buana, Implikasi Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Telepon Seluler Ilegal (Black Market), JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Vol. 6/ No. 1 – 1 September 2020, dalam rujukan ini fokus pada penelitian bagaimanakah implikasi pelaksanaan perjanjian jual beli telepon seluler ilegal atau black market. Didasarkan pada tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara yakni objek yang diperjanjikan merupakan kausa yang tidak halal menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian jual beli yang dilakukan dianggap tidak pernah terjadi sehingga kepastian hukum bagi konsumen atau hak dan kewajiban konsumen tidak dapat terpenuhi. Persamaan dengan penelitian penulis sama – sama meneliti telepon seluler ilegal. Perbedaan

pada penelitian terdahulu yang meneliti pelaksanaan jual beli telepon seluler ilegal ditinjau dari perjanjian jual beli yang berdasarkan pada kitab Undang-undang Hukum perdata (KUHPersdata) sedangkan dalam penelitian penulis meneliti penegakan hukum *smartphone* ilegal melalui regulasi *international mobile equipment identity* (IMEI).

Susana Caroline Eunike Tanor, Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Menjual Produk Impor ilegal Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lex Crimen Vol. VI/No. 9-November 2017, dalam rujukan tersebut penulis membahas tentang Pengaturan hukum penjualan produk impor di Indonesia dan penerapan hukum bagi pelaku usaha yang menjual produk impor ilegal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dimana Berdasarkan pengaturan hukum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Persamaan dengan penelitian penulis sama – sama meneliti tentang produk ilegal. Perbedaanannya adalah pada penelitian penulis lebih berfokus pada produk ilegal berupa perangkat telekomunikasi seluler jenis *smartphone* dan pada penelitian terdahulu penegakan hukum ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen sedangkan pada penelitian penulis didasarkan pada regulasi validasi *international mobile equipment identity* (IMEI).

Ahmad Ade Saputra, 2017, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat beredarnya Penjualan Elektronik Handphone Jenis Replika dan Paraller Import (Black Market) di Kota Pekanbaru, JOM Fakultas Hukum Vol. III/No. 1- Februari 2016, dalam rujukan tersebut penulis membahas tentang apa saja pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha berkaitan dengan penjualan elektronik handphone black market di kota Pekanbaru serta pertanggung jawaban hukum dari pelaku usaha kepada konsumen yang menjual elektronik handphone black market ilegal. Persamaan dengan penelitian penulis yakni sama-sama meneliti tentang smartphone ilegal. Sedangkan perbedaannya pada dasar aturan penegakan hukumnya, pada penelitian terdahulu menggunakan dasar hukum perlindungan konsumen sedangkan pada penelitian penulis dasar penegakan hukum smartphone ilegal bukan hanya menggunakan dasar UUPK tetapi juga dengan regulasi validasi IMEI.

Faillasuf Septanu Adivon mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tahun 2015 dalam skripsinya yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjualan Telepon Seluler Black Market (Ilegal)”. Dalam rujukan tersebut penulis terdahulu membahas tentang penegakan hukum tindak pidana penjualan seluler black market (ilegal) di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dan kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan telepon seluler black market (ilegal). Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama

meneliti tentang ponsel ilegal hanya saja pada penelitian terdahulu berfokus pada penegakan hukum tindak pidana penjualan telepon seluler black market (ilegal) khususnya ruang lingkup daerah jawa timur dengan menekankan pada sektor kepolisian. Sedangkan pada penelitian dengan ruang lingkup tidak berfokus pada suatu daerah melainkan satu wilayah indonesia dengan menekankan pada pengaturan regulasi *international mobile equipment identity* (IMEI)

Berdasarkan dari beberapa referensi yang telah di uraikan, maka penulis berusaha membuat penelitian yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Di tengah pro dan kontra terkait pemberlakuan validasi *international mobile equipment identity* (IMEI). Penulis membuat sebuah penelitian tentang implikasi hukum proses validasi *international mobile equipment identity* (IMEI) terhadap smartphone ilegal yang berkembang dari hak konsumen untuk mendapatkan keamanan dan informasi yang benar dan jelas atas barang yang dibeli agar terhindar dari peredaran produk smartphone ilegal. Serta memberikan pemahaman kepada masyarakat selaku konsumen dari dampak pembilan smartphone ilegal dengan di berlakukannya regulasi validasi IMEI yang berlaku di tanggal 18 agustus 2020.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*). Peter

Mahmud Marzuki menerangkan bahwa penelitian hukum normatif merupakan suatu metode dalam mencari peraturan – peraturan tertulis untuk menyelesaikan permasalahan hukum, penelitian ini dilaksanakan guna mendapat hasil argumen – argumen hukum, konsep maupun teori hukum baru sebagai penilaian masalah yang ada.⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif merupakan meninjau permasalahan hukum secara normatif (boleh atau tidak boleh menurut hukum yang berlaku).⁹ Pendekatan ini juga digunakan peneliti agar dapat melakukan penelusuran terhadap norma – norma hukum yang terdapat dalam peraturan Menteri komunikasi dan informatika, Peraturan Menteri Perdagangan, Peraturan Menteri Perindustrian yang mengatur tentang validasi *International Mobile Equipment Identity* (IMEI).

3. Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapat dari bahan kepustakaan. Data sekunder terdiri dari:

⁸ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Jakarta: Kencana, 2011, hlm.141.

⁹ Amirudin dan Zainal Asyikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta: rajawali Pers, 2010, hlm. 118.

1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang terdiri atas perundang – undangan, putusan hakim, catatan resmi dan risalah – risalah pembuat undang – undang.¹⁰ Pada penelitian ini penulis menggunakan bahan primer yang terdiri atas:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Komsunen
- d. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 108 tahun 2012 tentang Pendaftaran Produk Telepon Seluler, Komputer genggang, Komputer tablet
- e. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 tahun 2019 tentang Sistem Basis Data Identitas Perangkat Telekomunikasi Bergerak serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
- f. Peraturan Menteri Perdagangan No. 78 tahun 2019 tentang Perubahan Permendag Nomor 38 Tahun 2019 tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm. 141

Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronik dan Produk Telematika.

g. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 tahun 2016 tentang sertifikasi perangkat telekomunikasi pesawat telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet

h. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 1 tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui IMEI terkait validasi IMEI

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan – bahan hukum yang gunanya untuk menjelaskan tentang bahan hukum primer. Seperti artikel internet, hasil-hasil penelitian, asas – asas hukum, pendapat para ahli atau sarjana hukum yang dapat mendukung pemecahan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.¹¹

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan yaitu metode yang pengumpulan datanya dari bahan hukum yang dilakukan dengan mempergunakan

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm. 142

content analysis.¹² Metode ini digunakan penulis untuk memperoleh landasan teori dengan mengkaji memahami buku –buku, jurnal – jurnal maupun artikel – artikel , serta bahan bacaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Metode Analisis Data

Penyusunan skripsi ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu metode dengan menjelaskan data yang bermutu kedalam bentuk kalimat yang logis, teratur, dan efektif sehingga mudah dalam menginterpretasi data dan menganalisis data. Melalui metode ini penulis berusaha menemukan jawaban atas permasalahan yang ada, bagaimana implikasi proses validasi *international mobile equipment identity* (IMEI). Yang mana fokus dengan sanksi pemblokiran pada *smartphone* ilegal yang menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat dengan di selesaikan melalui pendekatan kualitatif fokus pada dasar – dasar secara umum dalam perwujudan tiap – tiap gejala sosial budaya, sehingga adanya gambaran pada hasil penelitian yang jelas, informasi yang disampaikan sesuai dengan keadaan nyata saat ini, sebagaimana kejadian sebenarnya.¹³

¹² *Ibid.*, hlm.21

¹³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, tt.p : Penerbit Rineka Cipta, 2001, hlm. 21

G. Rencana Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan proposal ini terdiri dari 4 (empat) bagian bab sebagai tahapan didalam penulisan, yaitu:

Bab I Pendahuluan. Bab ini merupakan pengembangan dari proposal yang menyajikan latar belakan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teoritik. Bab ini akan membahas mengenai tinjauan umum tentang hukum, tinjauan umum tentang smartphone, dan tinjauan umum tentang *international mobile equipment identity* (IMEI) .

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berupa uraian rumusan masalah tentang pengaturan terhadap peredaran smartphone ilegal di Indonesia dan implikasi hukum proses validasi *international mobile equipment identity* (IMEI) terhadap smartphone ilegal.

Bab IV Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum

1. Pengertian Hukum

Hukum diartikan sebagai tata aturan yang mengatur perilaku manusia dalam bermasyarakat dan bersifat memaksa, yang artinya bahwa seluruh tatanan tersebut berakibat terhadap peristiwa-peristiwa tertentu dan dianggap sebagai suatu yang tidak dikehendaki karena merugikan masyarakat. Dampak tersebut terutama ditujukan terhadap perilaku manusia yang merugikan, dengan menggunakan tindakan paksa. Namun pada dasarnya definisi pengertian hukum memiliki banyak segi dan dimensi, sehingga tidak mungkin memberikan definisi hukum yang sempurna untuk memadai sebuah keadaan. Dari realitanya banyak orang mendefinisikan hukum namun, justru beberapa ilmuwan yang mempelajari ilmu hukum merasa tidak mampu untuk mendefinisikan pengertian hukum berdasarkan persepsinya sendiri salah satunya Van Apeldoorn yang dalam karya-karya tulisannya tidak memuat pendefinisian hukum.¹⁴

Belum adanya kesepakatan para ilmuwan hukum dalam mendefinisikan pengertian hukum, karena terdapat kesulitan dalam mendefinisikan pengertian hukum. kesulitan tersebut disebabkan oleh 2

¹⁴ Angger saloko, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Badan Penyedia Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara, 2017, hlm.4.

(dua) faktor yakni faktor intern dan ekstern.¹⁵ Faktor intern karena adanya keadaan dimana dalam diri/ atau lingkup hukum, hukum bersifat abstrak. Hukum memiliki sifat abstrak kendati dalam penerapannya/ atau pengaplikasiannya berwujud konkret, seperti dalam mekanisme pendadilan dan pelaksanaan putusan hakim dimana dalam perwujudannya hukum jauh lebih luas dan sifatnya abstrak dibandingkan dengan proses peradilan dan hukum tertulis.¹⁶ Hukum hampir mengatur sebagian besar kehidupan manusia baik ketika masih dalam kandungan maupun setelah meninggal. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kesulitan dalam mendefinisikan hukum, karena suatu definisi harus singkat, jelas, tegas, dan sistematis serta merangkum seluruh substansi hukum. Kesulitan ini disebabkan oleh cakupan hukum yang begitu luas dan komprehensif di dalam kehidupan sosial manusia, sehingga perlu mengetahui, memahami serta mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut.

Walaupun tidak ada definisi yang sempurna mengenai pengertian hukum, definisi dari beberapa sarjana tetap digunakan yakni sebagai pedoman dan batasan melakukan kajian terhadap hukum. Meskipun tidak mungkin diadakan suatu batasan yang lengkap tentang apa itu hukum, namun Utrecht telah mencoba membuat suatu batasan yang dimaksud sebagai pegangan bagi orang yang hendak mempelajari ilmu hukum. Menurut Utrecht hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-

¹⁵ Eddhie Praptono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Tegal: Badan Penyedia Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2016, Cet.4, hlm. 20.

¹⁶ Ibid, hlm 21.

perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.¹⁷

Hans Kelsen mengartikan hukum adalah tata aturan (*rule*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia.¹⁸ Dengan demikian hukum tidak merujuk pada satu aturan tunggal (*rule*) tetapi separangkat aturan (*rules*) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem dengan kata lain tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja. Pengertian lain mengenai hukum, disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo, yang mengartikan hukum sebagai kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta bagaimana cara melaksanakan kepatuhan kepada kaidah-kaidah tersebut. Hukum memiliki sebuah tujuan yakni untuk terpelihara dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban. Tanpa keteraturan dan ketertiban

¹⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung Citra Aditya Bakti, 2005, hlm.38.

¹⁸ Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006, hlm.13.

kehidupan manusia yang wajar memang tidak mungkin, seseorang tidak dapat mengembangkan bakatnya tanpa adanya kepastian dan keteraturan.

2. Subjek dan Objek Hukum

Subjek Hukum merupakan segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban dalam hukum.¹⁹ Subjek hukum dalam kamus ilmu hukum disebut “orang” atau pendukung hak dan kewajiban karenanya subjek hukum memiliki kewenangan untuk bertindak menurut tata cara sesuai dengan ketentuan hukum. Subyek hukum terdiri atas:

a. Manusia (*natuurlijk person*)

Setiap orang selaku pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kedudukan sama di mata hukum. orang menjadi subjek hukum dimulai saat lahir dan berakhir setelah meninggal namun, dalam pasal 2 KUHPer terdapat pengecualian dimana bayi yang masih dalam kandungan dianggap telah lahir dan menjadi subjek hukum apabila kepentingannya menghendaki. Apabila bayi lahir dalam keadaan meninggal maka dianggap tidak pernah ada dan bukan subjek hukum. Terdapat ketentuan dimana seseorang tidak dapat dijadikan sebagai subjek hukum dimana orang dianggap tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum yakni anak yang masih dibawa umur dan orang dewasa yang berada dalam pengampuan (*curatelle*).

¹⁹ Eddhie Praptono, op.cit., hlm.27.

b. Badan Hukum (*rechts person*)

Sebuah lembaga yang dibuat/ didirikan oleh hukum berdasarkan akta otentik dan mempunyai tujuan tertentu. Berdasarkan teori fictie badan hukum dianggap sama dengan manusia sebagai subjek hukum dan hukum juga memberi hak dan kewajiban.²⁰ Badan hukum terdiri atas badan hukum prifat dan badan hukum publik. Badan hukum prifat terdiri atas perseroan terbatas PT, firma, CV, badan koperasi, yayasan dan badan hukum publik meliputi negara dan instansi Pemerintah.

Sedangkan obyek hukum merupakan segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum, serta dapat menjadi obyek dalam suatu hubungan hukum. Subjek hukum disebut juga benda atau barang dimana barang atau benda yang dimaksud menurut hukum adalah barang yang dapat dimiliki dan bernilai ekonomis. Benda sebagai subjek hukum dibagi menjadi 2 (dua); (1) benda berwujud, (2) benda bergerak dan benda tidak bergerak.

3. Sumber Hukum

Sumber hukum pada umumnya adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum serta tempat diketemukannya aturan hukum. Sumber hukum bisa dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhinya atau dilihat dari bentuknya. Sumber hukum yaitu sumber hukum materiil

²⁰ Eddhie Praptono, *op. cit.*, hlm 29.

dan formil. Sumber hukum materil meliputi faktor-faktor yang ikut mempengaruhi materi (isi) dari aturan-aturan hukum. Sumber hukum formal adalah sumber dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Sumber hukum formil merupakan dasar kekuatan mengikat peraturan-peraturan agar ditaati masyarakat maupun penegak hukum. Sumber hukum formal antara lain:²¹

a. Undang-undang

Peraturan negara yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan mengikat masyarakat.

b. Kebiasaan

Perbuatan manusia mengenai hal tertentu yang dilakukan secara berulang – ulang dan terhadapnya dipertalikan adanya ide hukum, sehingga perbuatan tersebut diterima dan dilakukan oleh suatu masyarakat.

c. Yurisprudensi

Keputusan pengadilan atau keputusan hakim yang terdahulu, yang dianggap tepat sehingga diikuti oleh pengadilan atau hakim lain.

d. Traktat (perjanjian antar negara)

Perjanjian antar Negara yang telah disahkan berlaku mengikat Negara peserta, termasuk warga negaranya.

²¹ Agus Sudaryanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: Setara Press, 2015, hlm 89-99.

- e. Doktrin adalah pendapat para sarjana hukum terkemuka yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan hukum pada umumnya dan secara khusus terhadap hakim dalam mengambil keputusannya.

4. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika). Secara konseptual arti dari penegakan hukum terletak pada aktifitas/ atau kegiatan menyeraskan sebuah hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang tepat serta tindakan sebagai rangkaian akhir guna menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²² Teori Penegakan Hukum Max Weber, penegakan hukum pada suatu masa berbeda dengan penegakan hukum pada masa yang lain, sebab perkembangan sosial dari masyarakatnya juga, supaya suatu penegakan hukum bisa diselenggarakan, diperlukan perlengkapan sosial tertentu. Singkatnya penegakan hukum merupakan sebuah upaya guna terciptanya tujuan dibentuknya tatanan hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat dan terciptanya suatu ketertiban dalam bermasyarakat. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu :²³

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 5.

²³ Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009. hlm 25-34.

- a. kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat.
- b. kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat.
- c. Keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subyektif, individualistic dan tidak menyamaratakan.

Didalam sebuah penegakan hukum terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut memiliki arti pening dari mulai pelaksanaan penyidikan sampai pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan.

Menurut Soejono Soekanto, Faktor-faktor tersebut antara lain:²⁴

a. Faktor hukumnya atau perundang-undangan

Semakin baik suatu peraturan hukum akan semakin memungkinkan penegakannya.²⁵ Sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah menegakkannya. Secara umum dapatlah dikatakan bahwa peraturan hukum yang baik itu adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.

b. Faktor Penegak Hukum

Pihak-pihak yang terkait secara langsung dalam proses penegakan hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, peradilan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi keberhasilan usaha penegakan hukum dalam masyarakat.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 5.

²⁵ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 20.

d. Faktor Masyarakat

Bagian yang terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Kesadaran hukum antara lain meliputi: Pengetahuan tentang hukum, penghayatan fungsi hukum, dan ketaatan terhadap hukum.

e. Faktor Kebudayaan

Semakin banyak persesuaian antara peraturan perundang-undangan dan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahnya menegakkannya. Sebaliknya apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, akan semakin sukar untuk melaksanakan atau menegakkan peraturan hukum dimaksud.

B. Tinjauan Umum Tentang Smartphone

1. Pengertian Smartphone

Smartphone atau ponsel pintar merupakan sebuah perangkat telekomunikasi berupa telepon genggam atau mobile versi modern terbaru yang mempunyai keunggulan pada spesifikasi software dan hardware lebih pintar, serta fungsi yang lebih cerdas dengan fitur fitur

yang lebih smart dari telepon seluler versi sebelumnya.²⁶ Keberadaan *smartphone* merupakan sebuah salah satu wujud kemajuan di bidang teknologi, membuat seseorang yang mampu mengaplikasikannya merasa selangkah lebih maju dari kondisi sebelumnya. Karena bagaimanapun juga, keberadaannya mempermudah kehidupan dan memiliki pengaruh yang luar biasa bagi kehidupan.²⁷

Smartphone Berdasarkan definisi menurut Pakar teknologi adalah : ²⁸

- a.) Gary B, Thomas J & Misty E, 2007 berpendapat bahwa *smartphone* merupakan sebuah telepon seluler yang memiliki *internet enabled* serta tersedianya fungsi personal digital assasint (PDA), diantaranya meliputi fotur kalender, buku alamat, kalkulator, agenda dan catatan.
- b.) Anderson & Blackwood 2004, berpendapat bahwa *smartphone* atau ponsel pintar adalah sebuah perangkat telekomunikasi seluler yang memiliki kemampuan lebih tinggi dibanding telepon seluler biasa. Kemampuan tersebut meliputi adanya koneksi internet, chatting/instant messaging, email, serta banyak aplikasi lainnya.
- c.) Menurut David Wood (wakil President Eksekutif PT Symbian OS) berpendapat bahwa *smartphone* berbeda dengan telepon genggam biasa melalui dua cara fundamental yakni bagaimana mereka dan apa

²⁶ Riza Azmi, *Peta dan Potensi Industri Perangkat Telekomunikasi Seluler di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama, 2016. Hlm 10.

²⁷ Oetama Jacob, *Sejarah Media dari Gutenberg Sampai Internet*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006. Hlm. 1.

²⁸ Djoko Suwiryono, *Kerangka Perangkat Telekomunikasi (HKT)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2007. Hlm. 30.

yang dapat mereka lakukan. pengertian lainnya memberikan penekanan perbedaan dari dua faktor ini.

Pencipta atau pembuat *smartphone* pertama di dunia berdasarkan IDC yang di publikasikan oleh aneka forum pada 02/03/2012 tahun lalu adalah Nokia, Samsung dan Apple. Kecenderungan ini hingga saat ini sepertinya masih terus berlanjut, dimana ketika produsen pembuat *smartphone* atau ponsel pintar ini masih tetap mendominasi pangsa pasar akan permintaan *smartphone* di seluruh pasar dunia.²⁹ Mereka adalah produsen, pencipta atau pembuat *smartphone* ternama yang mendapatkan jumlah presentase terbesar berdasarkan penelitian International Data Corporation (IDC). Nokia, Samsung dan Apple adalah sebagai pembuat atau pencipta *smartphone* teratas di Dunia. Dan berdasarkan grafik, di urutan pertama diduduki oleh Nokia, sebagai pembuat *smartphone* pertama di dunia, dan di urutan kedua adalah Samsung dan tiga teratas menyusul Apple.

Berbeda dengan telepon seluler, *smartphone* memberikan akses informasi langsung yang tersedia dalam sistem jaringan perusahaan maupun internet. Ketersediaan global dan jaringan telepon *broadband* dan aplikasi-aplikasi dapat mengubah penyampaian informasi kepada masyarakat bisnis, hukum, maupun komunitas peneliti. Fungsi-fungsi dari *smartphone*/ponsel pintar ini antara lain, sebagai aplikasi multimedia dapat digunakan sebagai pemutar musik maupun video, memiliki kamera,

²⁹ Oetama Jacob, *Sejarah Media dari Gutenberg Sampai Internet*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006. Hlm. 6.

dan aplikasi-aplikasi personal lainnya. Selain itu untuk mendukung produktivitas profesional ponsel pintar juga dapat digunakan sebagai media berkomunikasi melalui jaringan internet dengan aplikasi instant messaging atau chatting dan jejaring sosial, membaca e-mail personal, mempunyai kemampuan navigasi dan akses internet. Untuk produktivitas bisnis, dapat digunakan untuk menyusun makalah, proposal dan presentasi, menggunakan office, melakukan panggilan suara dan corporate messaging. Ponsel pintar memiliki kemampuan manajemen dan kebijakan pengontrolan aplikasi sehingga pengguna dapat membatasi seberapa dalam aplikasi dapat mengambil atau menggunakan informasi pribadi pengguna smartphone. Untuk keamanan ponsel pintar melengkapi perangkatnya dengan sistem enkripsi, manajemen data, dan penghapusan data jarak jauh jika suatu smartphone tersebut jatuh ke tangan orang lain yang tidak semestinya.

2. Pengertian Legal dan Ilegal

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) ilegal merupakan lawan kata dari legal yang memiliki tidak sah, dan/ atau tidak sesuai dengan hukum/ atau peraturan perundang undangan yang berlaku. suatu perbuatan atau benda dikatakan ilegal yakni apabila perbuatan atau benda tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. pada umumnya, barang ilegal merupakan barang atau produk yang tidak dijual atau diedarkan di sebuah wilayah karena beberapa alasan tertentu sehingga tidak memiliki keabsahan hukum karena dilarang

perdarannya. hal tersebut dikarenakan beberapa alasan diantaranya pada barang import tidak dilakukan melalui peraturan import sebagai mana mestinya contohnya pada barang hasil penyeludupan, dan pada barang lokal yakni barang yang secara terang-terangan dilarang oleh undang-undang untuk di perdagangkan tanpa melalui ijin terhadap pihak terkait atau di edarkan salah satu contohnya adalah pada penjualan smartphone black market. barang ilegal yang di perdagangkan memiliki harga murah dibandingkan barang legal, sehingga bagi sebagian orang membeli barang ilegal merupakan solusi satu-satunya untuk mendapatkan barang yang sangat didambakan. Dari hal tersebut, tentu ada beberapa pihak yang akan terkena dampaknya dari hasil penjualan barang yang tidak mempunyai garansi ini, di antaranya:

a) Kerugian Bagi Negara

Barang resmi yang dikirim dari luar negeri yang dimaksudkan untuk dijual-belikan terkena biaya pajak. Akan tetapi, jika barang tersebut adalah barang yang sengaja diselundupkan untuk dijual kembali, maka tak akan dikenai pajak. Salah satu pihak yang akan mendapat kerugian besar dari penjualan barang ilegal adalah negara. Negara akan kehilangan pendapatan dari pajak bea cukai. Jika masih banyak konsumen yang memutuskan untuk membeli barang ta resmi, maka dipastikan orang-orang tersebut sangat mendukung negaranya untuk mengalami kerugian.

b) Kondisi persaingan usaha yang tidak sehat

dampak dari barang ilegal juga akan dialami perusahaan/ distributor resmi sebuah barang. dimana pada barang ilegal yang mematok harga murah dengan kualitas yang tidak jauh berbeda dengan barang legal akan banyak menarik minat masyarakat untuk membeli barang tersebut. akibatnya pada barang keluaran perusahaan/ distributor resmi kurang laku dipasaran karena banyak masyarakat yang lebih memilih barang ilegal.

c) Konsumen Tidak Mendapatkan Perlindungan Barang (Garansi)

Hal yang tidak akan diterima oleh seorang pembeli atau konsumen yang membeli barang ilegal adalah garansi resmi dari produsen. Jika barang yang dibeli mengalami kecacatan atau bahkan kerusakan produsen yang asli tidak dapat menanggungnya karena pada barang ilegal khususnya pada produk elektronik tidak dilengkapi dengan kartu garansi dan layanan purna jual. berbeda dengan barang legal yang dibeli pada distributor resmi, akan diberikan kartu garansi dengan jangka waktu berkisar 1 (satu) tahun sehingga apabila barang mengalami kerusakan produsen akan menanggungnya salah satunya pada pemberian layanan service center dan apabila barang sudah tidak dapat diperbaiki akan dilakukan penukaran barang sebelum tanggal garansinya berakhir.

3. Pengaturan Peredaran *smartphone* di Indonesia

Smartphone yang akan diedarkan di Indonesia harus melalui beberapa tahapan agar dapat dinyatakan produk sesuai dengan standar nasional indonesia. berikut beberapa pengaturan terkait syarat mengedarkan *smartphone* di indonesia:

a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 tahun 2016 tentang sertifikasi perangkat telekomunikasi pesawat telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet

Dalam peraturan ini disebutkan bahwa sebuah perangkat telekomunikasi telepon seluler/ *smartphone* sebelum beredar untuk diperdagangkan di wilayah negara republik indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis salah satunya tahapan sertifikasi perangkat telekomunikasi. Prosedur sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi pada dasarnya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tahap:

1.) Permohonan Sertifikasi

Pada tahap ini pemohon sertifikasi mengajukan permohonan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi yang ditujukan kepada Direktorat Standardisasi Pos dan Telekomunikasi. Pemohon sertifikasi adalah Pabrikan (Perwakilannya), Distributor (Resmi), Importir dan Institusi. Institusi adalah badan usaha yang menggunakan alat dan perangkat telekomunikasi untuk keperluan sendiri, seperti operator telekomunikasi, service provider atau institusi pemerintah.

Permohonan sertifikasi dilampiri:

- Formulir FR PM 4 dan FR PM 5 (diisi terlebih dahulu untuk 1 tipe alat atau perangkat masing-masing 1 formulir)
- Dokumen legal perusahaan, yaitu Akte Pendirian Perusahaan,
- Surat Ijin Usaha Perdagangan, NPWP.
- Dokumen teknis perangkat, yaitu buku manual, brosur dan spesifikasi teknis alat dan perangkat yang akan disertifikat.
- Bagi pemohon distributor resmi, melampirkan surat penunjukan sebagai distributor dari pabrikan atau principal.
- Bagi pemohon importir, melampirkan copy Nomor Pengenal Impor Khusus (NPIK).
- Khusus sertifikasi dalam hal Mutual Recognition Arrangement (MRA), dokumen tambahan (Laporan Hasil Uji dari laboratorium pengujian yang telah terakreditasi ISO 17025)

Setelah permohonan diajukan, maka akan dilakukan pengecekan kelengkapan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi yang akan digunakan sebagai acuan untuk pengujian. Apabila persyaratan administrasi dinyatakan lengkap dan persyaratan teknis tersedia, maka dalam waktu maksimum 5 hari akan diterbitkan Surat Pemberitahuan

Pembayaran (SP2) dan Surat Pengantar Pengujian Perangkat (SP3), apabila pengujian dilakukan di Balai Uji Ditjen Postel. Apabila pengujian perangkat akan dilakukan di Telkom Risti Bandung, maka maksimum 5 hari akan diterbitkan Surat Pengantar Pengujian Perangkat (SP3). Apabila persyaratan teknis yang akan digunakan sebagai acuan pengujian belum tersedia, maka akan dilakukan penyusunan persyaratan teknis terlebih dahulu. Sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi belum dapat diproses lebih lanjut sampai dengan ditetapkannya persyaratan teknis oleh Dirjen Postel.

2.) Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi

Setelah pemohon menerima SP3, tahap sertifikasi dilanjutkan dengan pengujian alat dan perangkat telekomunikasi. Pemohon membawa bukti pembayaran biaya pengujian dan SP3 ke Balai Uji Ditjen Postel. Membawa SP3 untuk pengujian di Telkom Risti. Disamping itu, pemohon membawa pula sample alat dan perangkat yang akan diuji, 2 buah sample untuk perangkat consumer premises equipment (CPE) dan 1 untuk perangkat non-CPE, seperti sentral. Saat ini lembaga pengujian alat dan perangkat telekomunikasi yang tersedia adalah Balai Uji Perangkat Telekomunikasi Ditjen Postel dan Telkom Risti Bandung. Pengujian alat dan perangkat telekomunikasi maksimum dilaksanakan selama 45 hari.

3.) Penerbitan Sertifikat

Setelah selesai pengujian alat dan perangkat telekomunikasi, Balai Uji Ditjen Postel atau Telkom Risti Bandung mengirimkan Laporan Hasil Uji kepada Direktur Standardisasi Postel. Laporan Hasil Uji tersebut akan dilakukan evaluasi lebih lanjut. Apabila alat dan perangkat telekomunikasi memenuhi persyaratan teknis yang berlaku, akan diterbitkan sertifikat. Sedangkan apabila alat dan perangkat telekomunikasi tidak memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan, pemohon akan diberitahukan melalui surat. Sertifikat atau pemberitahuan tidak memenuhi persyaratan teknis diterbitkan maksimum 10 hari sejak diterimanya Laporan Hasil Uji.

Setelah pemohon menerima sertifikat, pemohon wajib melekatkan label pada alat dan perangkat telekomunikasi yang telah bersertifikat. Label ini untuk keperluan perlindungan konsumen dan pengawasan alat dan perangkat telekomunikasi di pasar.

b. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 108 tahun 2012 tentang Pendaftaran Pendaftaran Produk Telepon Seluler, komputer genggam, dan komputer tablet

Pada dasarnya smartphone yang akan di produksi atau di impor untuk di perdagangkan di wilayah negara republik indonesia harus mendaftarkan produknya. pendaftaran produk mencakup; tipe, nomor identitas setiap produk, dan jumlah yang akan di produksi

maupun di Import. sedangkan jenis pendaftaran produk terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1.) Tanda Pendaftaran Produk-Produksi (TTP-Produksi)

TTP-Produksi digunakan pada smartphone lokal hasil produksi, dimana permohonan TTP-Produksi oleh perusahaan pemohon wajib melengkapi:

- a. sertifikat merek atau tanda merek dari direktur jenderal hak kekayaan intelektual, kementerian Hukum dan HAM, pada merek yang diproduksi merupakan merek milik perusahaan pemohon,
- b. perjanjian lisensi merek dan pemegang merek atas produk yang telah didaftarkan pada direktur jenderal Hak kekayaan intelektual, Kementerian Hukum dan HAM.
- c. Perjanjian kerjasama teknis dengan pemegang merek atas produk yang akan diproduksi

2.) Tanda Pendaftaran Produk-Import (TTP-Import)

Pada Pendaftaran Produk-Import (TTP-Import) berlaku pada produk smartphone import/ di datangkan dari luar negeri. Khusus untuk perusahaan pemohon TTP-Import wajib mempunyai bukti-bukti sebagai importir di Indonesia dari prinsipal pemegang merek atas produk yang diimport.

apabila ketentuan diatas terpenuhi semuanya maka dapat dipastikan pendaftaran smartphone akan di setujui dan terdaftar di kementrian

perindustrian, karena TTP-Produksi merupakan sebuah dasar acuan dapat atau/ tidaknya sebuah *smartphone* diproduksi di wilayah Indonesia. Begitu juga pada TTP-Import digunakan sebagai dasar pertimbangan dan syarat penerbitan atas *smartphone* agar dapat diperdagangkan di wilayah Indonesia.

c. Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 38 tahun 2019 tentang ketentuan petunjuk penggunaan dan jaminan layanan purna jual bagi produk elektronika dan telamatika

Setiap Produsen atau Importir wajib melengkapi setiap Produk Elektronika dan Produk Telematika dengan Petunjuk Penggunaan dan Kartu Jaminan dalam Bahasa Indonesia sebelum diperdagangkan di pasar dalam negeri. Dalam mengedarkan/ atau memperdagangkan *smartphone* di wilayah Negara Republik Indonesia harus dilengkapi dengan kartu garansi dan petunjuk penggunaan. Tidak hanya itu saja Produsen atau Importir wajib memberikan pelayanan purna jual selama masa jaminan yakni paling sedikit selama 1 (satu) tahun. layanan purna jual meliputi: ketersediaan Pusat Layanan Purna Jual, ketersediaan suku cadang, penggantian suku cadang sesuai jaminan selama masa jaminan yang diperjanjikan, dan penggantian produk sejenis apabila terjadi kerusakan yang tidak dapat diperbaiki selama masa jaminan yang diperjanjikan.

tiga peraturan tersebut merupakan dasar/ atau landasan hukum dalam pengedaran *smartphone* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

apabila *smartphone* memenuhi ketiga peraturan tersebut dapat dipastikan *smartphone* legal karna diedarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. sebaliknya apabila *smartphone* tidak melewati proses sebagaimana diatur diatas maka *smartphone* akan dinyatakan tidak sesuai standar nasional Indonesia dan dinyatakan sebagai produk ilegal dikarenakan tidak terdata di database pemerintah.

4. Dampak Negatif Peredaran Smartphone Ilegal

Lebih dari 10 (sepuluh) juta unit per tahun *smartphone* ilegal beredar di Indonesia dengan total kerugian penerimaan negara sebesar Rp2,81 (dua koma delapan puluh satu) triliun pertahun, angka tersebut sangat memprihatinkan mengingat peredaran *smartphone* ilegal memiliki banyak dampak negatif tidak hanya bagi negara tetapi juga bagi konsumen, dan distributor resmi perangkat telekomunikasi seluler.³⁰ Berikut beberapa dampak negatif dari peredaran *smartphone* ilegal:

- a. Kualitas *Smartphone* ilegal tidak melewati proses kualitas kontrol yang memenuhi standarisasi pabrik sehingga kualitas keamanan tidak terjamin dan dapat merugikan konsumen. Bisa saja *smartphone* tidak dalam kondisi baru, melainkan *smartphone* rekondisi bahkan palsu. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 8 huruf e Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang

³⁰ Kementerian Perindustrian Republik Indonesia: *Perangi Ponsel Ilegal, Tiga Menteri Taken Aturan Bersama*, Siaran Pers Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, <https://kemenperin.go.id/artikel/21160/Perangi-Ponsel-Ilegal,-Tiga-Menteri-Teken-Aturan-Bersama>, 18 Oktober 2019.

menegaskan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan mutu standar nasional indonesia.³¹

- b. Tidak adanya kartu garansi dari distributor resmi dan layanan purna jual, hanya diberi kartu garansi toko yang hanya berlaku 1 (satu) sampai 3 (tiga) bulan setelah pembelian. Jangka waktu tersebut menyalahi ketentuan pasal 25 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mana aturan pemberian garansi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.³² Hal tersebut tentu saja sangat merugikan bagi konsumen, dan lagi apabila *smartphone* mengalami kerusakan yang di berikan bukan suku cadang resmi yang direkomendasikan melainkan suku cadang tiruan.
- c. Pada *smartphone* ilegal tidak melalui prooses pendaftaran pada Kementrian Perindustrian dan pada *smartphone* impor tidak melalui proses impor yang benar sesuai peraturan perundang-undangan, seperti uji perangkat telekomunikasi, uji verifikasi, dan tidak membayar bea masuk. Akibatnya negara dirugikan kerana tidak adanya pajak masuk. Perlu diketahui bahwa potensi kerugian penerimaan negara dari pajak karena peredaran *smartphone* ilegal sebesar Rp2,81 triliun per tahun.³³

³¹ Andika Prawira Buana, “Implikasi Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Telepon Seluler Ilegal (Black Market)”, JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Vol. 6/ No. 1 – 1 September 2020. Hlm 130.

³² Ibid 131.

³³ Bernadinus Adi Pamungkas, *Ponsel BM mulai diblokir Tahun Depan, Sudah Cek IMEI Ponselmu?*, Warta Ekonomi, <https://m.wartaekonomi.co.id/berita259944/ponsel-bm-mulai-diblokir-tahun-depan-sudah-cek-imei-ponselmu>, 5 Desember 2019.

- d. Tercipnyanya sebuah kondisi kurang sehat pada industri perangkat telekomunikasi seluler. Selisih harga smarphone legal dan ilegal sangat jauh bahkan pada *smarphone* ilegal bisa setengah harga dari smartphone legal. Karena tawaran harga yang menggiurkan tersebut menjadikan sebagian konsumen lebih tertarik pada smartphone ilegal di banding legal. Hal tersebut menciptakan timbulkan persaingan dagang yang tidak sehat.
- e. Produk *samrtphone* berdampak regulasi pemblokiran IMEI, pada smartphone ilegal memiliki nomor *international mobile equipment identity* (IMEI) yang tidak terdaftar pada database kementerian perindustrian. Dengan mulai ditetapkannya regulasi validasi imei maka smartpohe ilegal tidak dapat mengakses jaringan dan smartphone tidak dapat digunakan sebagaimana fungsinya.

C. Tinjauan Umum tentang *Internatiaonal Mobile Equipmen Identity* (IMEI)

1. Pengertian *Internatiaonal Mobile Equipmen Identity* (IMEI)

International mobile equipment identity (IMEI) merupakan sebuah nomor identitas resmi pada perangkat telekomunikasi dan informatika khususnya pada perangkat HKT (Handphone, komputer, dan tablet) yang tersambung pada jaringan bergerak untuk mengidentifikasikan legal tidaknya sebuah perangkat HKT. Nomor unik *international mobile equipment identity* (IMEI) berjumlah 15 (lima belas) digit angka berisi

informasi tipe smartphone. Keunikan pada digit nomor IMEI bertujuan agar jika di keluarkan secara legal, satu seri akan berbeda dengan yang lain. Berikut pengertian *Internatiaonal Mobile Equipment Identity* (IMEI) menurut para ahli:

1. Ismail MT (Dirjen Sumber Daya & perangkat Pos dan Informatika SDPPI, KOMINFO) berpendapat bahwa *International mobile equipment identity* (IMEI) merupakan sebuah nomor identitas khusus yang di keluarkan oleh asosiasi GSM (GSMA) untuk setiap slot kartu GSM yang dikeluarkan oleh produsen *smartphone*. Dikarenakan nomor ini dikeluarkan untuk tiap kartu sim, untuk itu pada suatu perangkat dengan slot kartu sim ganda akan mempunyai dua nomor IMEI.
2. Merza Fachys (Wakil Ketua umum ATSI) berpendapat bahwa *international mobile equipment identity* (IMEI) merupakan identitas resmi sebuah *smartphone* berjumlah 15 digit angka yang ada di setiap *smartphone* yang menunjukkan bahwa perangkat telekomunikasi sebuah produl legal.
3. Djanurindro Wibowo (Kepala Subdiktora Import Direktorat Teknis Kapabea), berpendapat bahwa *international mobile equipment identity* (IMEI) merupakan sebuah identitas yang diberikan kepada setiap ponsel di dunia unruk bisa mengakses jaringan. Bentuk dari IMEI berupa sebuah kode 14-15 digit

angka yang merupakan sebuah digit angka yang unik, karena tiap ponsel memiliki kode/ atau nomer IMEI yang berbeda.

2. Fungsi *International Mobile Equipment Identity* (IMEI)

Diberikanya sebuah nomor unik IMEI pada tiap *smartphone* legal berfungsi sebagai:

1. Mengetahui identitas *smartphone*

IMEI dikatakan sebagai identitas sebuah *smartphone*, karena merupakan sebuah nomor yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat telekomunikasi seluler yang valid. IMEI juga dapat digunakan sebagai sarana pengecekan legal atau ilegalnya sebuah perangkat telekomunikasi jenis *smartphone*.

2. Melacak *smartphone* apabila hilang

IMEI digunakan oleh jaringan GSM guna mengidentifikasi perangkat yang valid dan dapat digunakan untuk menghentikan *smartphone* yang dicuri agar tidak dapat mengakses sebuah jaringan. pada kasus *smartphone* yang hilang/atau dicuri pengguna/pemilik dapat menghubungi penyelenggara jaringan dan dapat dilakukan sebuah pelacakan bahkan sebuah pemblokiran jaringan pada *smartphone* tersebut. pelacakan *smartphone* dilakukan melalui cara mendatangi gerai terdekat operator seluler yang di gunakan, kemudian menunjukan nomor IMEI dengan demikian keberadaan *smartphone* dapat dilacak keberadaanya.

3. Pengaturan *Internasional Mobile Equipment identity* (IMEI) di Indonesia

Pengaturan *International mobile equipment identity* (IMEI) mencakup 3 (Tiga) peraturan menteri yakni:

a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Purna Jual Bagi Produk Elektronik dan Telematika

Peraturan ini berlaku berfokus pada kewajiban-kewajiban pelaku usaha baik produsen maupun importir untuk menjamin kevalidan IMEI sebuah perangkat telekomunikasi seluler. Beredarnya smartphone ilegal tidak lepas dari peranan pelaku usaha dan/ atau importir. Hadirnya perubahan atas peraturan menteri perdagangan nomor 38 tahun 2019 tentang ketentuan petunjuk penggunaan dan jaminan purna jual produk elektronik dan telematika guna mengoptimalkan sebuah aturan. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa wajib bagi produsen, importir, dan pelaku usaha memperdagangkan perangkat telekomunikasi dengan IMEI yang tervalidasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. dalam artian tiap-tiap perangkat telekomunikasi harus dengan IMEI dengan daftar putih. Perangkat telekomunikasi seluler yang di perdagangkan wajib bagi produsen, importir, dan pelaku usaha untuk mencantumkan IMEI

pada label produk dan kemasan produk agar dapat dilihat oleh konsumen.

Akan dilakukan penarikan produk apabila produk perangkat telekomunikasi seluler dengan IMEI yang tidak teregistrasi dan tervalidasi dengan kata lain produk perangkat telekomunikasi memiliki IMEI dalam daftar hitam. produsen dan Importir wajib melakukan penarikan pada produk tersebut dari peredaran sesuai dengan surat perintah menteri apabila tidak dilakukan penarikan maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha setelah 3 (tiga) kali peringatan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari jam kerja.

b. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Sistem Berbasis Data Identitas Perangkat Telekomunikasi Bergerak

Dalam peraturan menteri perindustrian mengatur secara spesifik terkait pengolahan basis data International Mobile Equipment Identity. Basis data IMEI merupakan kumpulan data identitas perangkat telekomunikasi bergerak nasional. melalui peraturan ini dibentuklah sebuah sistem informasi basis data Identitas Perangkat Telekomunikasi Bergerak nasional yang selanjutnya di sebut SIBINA. Tujuan dibentuknya SIBINA yakni untuk dilakukannya pengelolaan dan penyediaan basis data IMEI perangkat telekomunikasi bergerak yang di produksi dan beredar di Indonesia.

Guna terlaksananya tujuan dari SIBINA sebagaimana diatur pada pasal 2 ayat (2) maka dilakukan:

a) Pengumpulan data IMEI dari SIINas

Data *international mobile equipment identity* (IMEI) merupakan identitas perangkat telekomunikasi yang didapatkan secara internasional. Data IMEI tersebut lalu di kumpulkan pada SIINas (sistem industri nasional) yang kemudian di kelola melalui pendaftaran perangkat telekomunikasi bergerak sesuai dengan tanda pendaftaran produk (TPP).

b) Pengelolaan data *international mobile equipment identity* (IMEI)

Data IMEI yang telah terkumpul pada sistem industri nasioanal (SIINas) kemudian dikelola dan dikelompokkan menjadi: (1) **Daftar putih**, dimana pada data IMEI yang tergolong dalam daftar putih merupakan IMIEI yang falid terdaftar sesuai tanda pendaftaran produk (TPP); (2) **Daftar Notifikasi**, dimana data IMEI yang tergolong daftar notifikasi merupakan data IMEI yang tidak terdaftar dalam EIR karena produk telekomunikasi seluler terdeteksi tidak terdaftar sesuai dengan tanda pendaftaran produk (TPP); (3) **Daftar hitam**, merupakan data imei berstatus daftar notofikasi yang selama

jangka waktu 90 hari setelah menyampaikan oleh penyelenggara tidak dilakukan registrasi ulang.

c. **Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tentang Pengendalian Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung Ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi *International Mobile Equipment Identity* (IMEI)**

Peraturan ini berfokus pada pemberian dan/atau pembatasan akses jaringan bergerak seluler. dijelaskan pada pasal 3 ayat (1) bahwa tiap-tiap perangkat telekomunikasi seluler jenis HKT (handphone, komputer, dan tablet) wajib dilakukan sebuah verifikasi IMEI dengan mencocokkan IMEI perangkat telekomunikasi seluler dengan tanda pendaftaran produk (TTP) oleh pemerintah sebelum diberikannya akses jaringan bergerak seluler. Akan diberikan akses jaringan bergerak apabila: (1) Perangkat HKT yang memiliki IMEI valid, terregistrasi sesuai dengan kartu tanda pendaftaran produk; (2) Perangkat dengan IMEI daftar notifikasi sebelum 90 (sembilan puluh) setelah disampaikan status IMEI; (3) Perangkat HKT yang aktif sebelum regulasi IMEI berlaku yakni sebelum tanggal 18 April 2020; (4) Perangkat HKT milik perwakilan negara asing; (5) Perangkat HKT milik wisatawan asing.

Dan akan diberikan pembatasan/ atau pemblokiran perangkat HKT dengan IMEI: (1) Perangkat HKT dengan IMEI tidak dimana IMEI yang tidak terverifikasi melalui EIR dikarenakan tidak ada kecocokan

dengan kartu tanda pendaftaran produk (TPP); (2) Perangkat HKT dengan IMEI daftar hitam/ atau perangkat HKT dengan IMEI yang masuk dalam daftar abu-abu dan selama 90 (sembilan puluh) hari tidak dilakukan registrasi ulang; (3) Perangkat HKT yang dimohonkan pembatasan untuk memblokir IMEI pada perangkat HKT yang dicuri/atau hilang untuk di keluarkar dari daftar putih dan di masukkan ke daftar hitam untuk dilakukan pemblokiran.

Peraturan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dalam memperoleh perangkat telekomunikasi berkualitas, melindungi operator seluler dari tersambungnya perangkat telekomunikasi tidak berkualitas yang dapat mengurangi kualitas pelayanan serta mengurangi tingkat kejahatan pencurian perangkat telekomunikasi HKT.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Terhadap Larangan Peredaran *Smartphone* Ilegal di Indonesia

Smartphone merupakan sebuah perangkat telekomunikasi seluler yang memiliki kemampuan lebih tinggi dibanding telepon seluler biasa. Kemampuan tersebut meliputi adanya koneksi internet, chatting/instant messaging, email, serta banyak aplikasi lainnya. Di Indonesia peredaran *smartphone* tidak bebas begitu saja. Untuk dapat diedarkan melalui perdagangan sebuah produk *smartphone* harus melalui beberapa tahapan agar sesuai dengan standar nasional (legal) baik *smartphone* produksi/ atau impor wajib didaftarkan di Kementerian Perindustrian.³⁴ Pendaftaran tersebut mencakup tipe, nomor identitas setiap produk, jumlah yang akan di produksi dan/ atau produk yang akan di import. Pasal 3 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 108 tahun 2012 tentang Pendaftaran Produk Telepon Seluler, Komputer genggam, Komputer tablet menyatakan bahwa:

“Tiap-tiap telepon seluler, komputer genggam, komputer tablet yang akan didaftarkan wajib memenuhi persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Peraturan Perundang-undangan merujuk pada proses sertifikasi sebuah perangkat telekomunikasi seluler. Disebutkan pada Pasal 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 tahun 2016 tentang

³⁴ Budhijanto Dandrivanto, “Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi”, Jakarta: Refika Aditama, 2016. hlm 34.

sertifikasi perangkat telekomunikasi pesawat telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet bahwa:

“Setiap alat dan/ atau perangkat telekomunikasi yang di buat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan/ atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini tiap-tiap *smartphone* yang akan diedarkan wajib memenuhi syarat teknis yang telah ditentukan dalam peraturan tersebut, persyaratan teknis yang dimaksud adalah melalui proses sertifikasi perangkat. Sertifikasi perangkat meliputi pengujian alat dan perangkat telekomunikasi. sertifikasi perangkat bertujuan agar *smartphone* yang beredar dimasyarakat memiliki kualitas perangkat setandar nasional yang sehingga aman bagi pengguna.

Pada produk *smartphone* telah melalui proses tersebut dan dinyatakan lolos maka akan terdaftar di database pemerintah sehingga dapat di sebut sebagai *smartphone* legal karena sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Sedangkan pada *smartphone* yang tidak melalui tahapan tersebut tidak akan terdaftar dalam database pemerintah sehingga dapat dikatakan produk *smartphone* tersebut ilegal/ tidak sah secara hukum karena bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Ciri utama produk *smartphone* ilegal adalah pada aspek jaminan. Pada produk *smartphone* ilegal hanya akan di berikan kartu jaminan toko bukan jaminan dari distributor

resmisnya.³⁵ Sehingga apabila terjadi cacat pada produk tidak akan bisa dimintakan sebuah pertanggung jawaban pada si penjual. Pada *smartphone* ilegal juga memiliki nomor identitas perangkat (IMEI) tidak valid karena tidak terdata di Kementrian Perindustrian maupun di database Pemerintah. Jadi apabila pada pembelian *smartphone* hanya diberi kartu jaminan/ atau garansi toko dan apabila dicek nomor *international mobile equipment identity* (IMEI) tidak valid maka dapat dipastikan *smartphone* tersebut ilegal.

Smartphone ilegal berdampak negatif baik bagi negara, produsen, maupun masyarakat selaku konsumen, diantaranya: Pada *smartphone* ilegal tidak melalui proses pendaftaran pada Kementrian Perindustrian dan pada *smartphone* impor tidak melalui proses impor yang benar sesuai peraturan perundang-undangan, seperti uji perangkat telekomunikasi, uji verifikasi, dan tidak membayar bea masuk. Akibatnya negara dirugikan kerana tidak adanya pajak masuk. *Smartphone* ilegal tidak melewati proses kualitas kontrol yang memenuhi standarisasi pabrik sehingga kualitas keamanan tidak terjamin dan serta tidak adanya kartu garansi dari distributor resmi dan layanan purna jual, apabila *smartphone* mengalami kerusakan yang di berikan bukan suku cadang resmi yang direkomendasikan melainkan suku cadang tiruan sehingga dapat merugikan konsumen selaku pembeli. Di

³⁵ Vincent Thoma Fabian, “YLKI: Penerapan IMEI Bisa Bantu Lindungi Konsumen Pengguna Ponsel”, Tirto.id, <https://tirto.id/ylki-penerapan-imei-bisa-bantu-lindungi-konsumen-pengguna-ponsel-edv6>, 14 Juli 2019.

Indonesia pengaturan terkait larangan peredaran *smartphone* diatur dalam beberapa pengaturan, yakni sebagai berikut:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Beredarnya perangkat telekomunikasi seluler berupa *smartphone* ilegal bersumber dari kegiatan jual-beli antar konsumen dan produsen. Terjadinya sebuah jual beli *smartphone* berdasar pada perjanjian jual-beli. Disebutkan dalam pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) bahwa jual beli adalah suatu perjanjian atau persetujuan atau kontrak di mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lainnya yang mengikatkan dirinya untuk membayar harga yang telah dijanjikan. R. Wirjono Prodjodikoro menyebutkan perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan penjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan pembeli. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal balik ini adalah sesuai dengan istilah Belanda *koop en ver koop* yang satu ‘*verkoop*’ (menjual) sedangkan yang lainnya ‘*koop*’ (membeli).³⁶

Perjanjian jual beli termasuk dalam jenis perjanjian timbal balik, dan perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak, misalnya perjanjian jual beli.³⁷ Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa perjanjian jual

³⁶ R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, 2011, hlm. 22.

³⁷ Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 90.

beli adalah perjanjian timbal balik yang berarti masing-masing pihak mempunyai kewajiban sebagai akibat yang diperbuatnya. Adapun penjual wajib menyerahkan barang yang dijualnya dan sekaligus berpihak atas pembayaran dari si pembeli.

Syarat sah dari sebuah perjanjian diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) yakni:

a. Kesepakatan Antar Kedua Belah Pihak

Kesepakatan mempunyai arti dimana adanya persesuaian kehendak antara kedua belah pihak tanpa adanya sebuah paksaan terkait hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dimaksudkan bahwa antara para pihak harus mempunyai keinginan yang bebas tanpa adanya tekanan/atau paksaan untuk mengikatkan diri, dimana dalam kesepakatan dapat dinyatakan secara diam-diam maupun secara tegas. Bebas di sini di artian sebagai bebas dari kekhilafan (*dwaling, mistake*), paksaan (*dwang, dures*), dan penipuan (*bedrog, fraud*). Secara *a contrario*, berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdata, perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan.

b. Kecakapan Para Pihak

Menurut Pasal 1329 KUHPerdata menentukan bahwa setiap orang dinyatakan cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Tidak cakupnya

seseorang tercantum dalam pasal **1330 KUHPerdato** yakni:
seseorang yang belum dewasa dan berada dalam pengampunan.

c. Suatu hal tertentu

Hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang paling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya. Menurut Pasal 1333 KUHPerdato, objek perjanjian tersebut harus mencakup pokok barang tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. Pasal 1332 KUHPerdato menentukan bahwa objek perjanjian adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan.

d. Suatu sebab yang halal

Sebab yang halal berhubungan dengan isi perjanjian itu sendiri, di mana perjanjian tersebut dibuat berdasarkan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Perjanjian yang dibuat berdasarkan sebab yang tidak benar atau dilarang membuat perjanjian tersebut menjadi tidak sah. Sebab yang tidak halal adalah sebab dilarang oleh Undang-Undang, berlawanan dengan norma kesusilaan, atau ketertiban umum. Nilai-nilai kesusilaan dan ketertiban umum sendiri ditentukan berdasarkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat di mana perjanjian tersebut dibuat.

Pada produk *smartphone* ilegal tidak memenuhi mutu standar nasional karena tidak melalui tahapan verifikasi dan sertifikasi perangkat

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga, jika *smartphone* ilegal yang diperdagangkan apabila diperoleh dari hasil penadahan, penyeludupan, pencurian, dan / atau diperoleh dari cara-cara lain yang melanggar peraturan Perundang-undangan dapat dikatakan jual beli tersebut tidak sah karena tidak memenuhi syarat perjanjian adanya suatu sebab yang halal untuk itu secara tidak langsung dalam KUHPer melarang akan adanya peredaran *smartphone* ilegal melalui perdagangan.

2. Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan sebuah upaya hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usaha memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen. konsumen dalam hal ini yakni pembeli dan/ atau pengguna *smartphone*.³⁸ Hukum perlindungan konsumen mengupayakan agar hak-hak konsumen terpenuhi secara utuh. Berkaitannya dengan Undang-undang perlindungan konsumen dalam peredaran *smartphone* ilegal melalui kegiatan jual-beli diatur secara tidak langsung terkait pemenuhan hak-hak konsumen. Beredarnya *smartphone* ilegal menjadikan adanya hak masyarakat selaku konsumen seperti yang dimaksudkan dalam pasal 4 Undang-

³⁸ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, Cet ke-1, hlm. 21.

undang perlindungan konsumen (UUPK) tidak terpenuhi. Hak konsumen yang dilanggar dalam peredaran *smartphone* ilegal meliputi:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi

Disebutkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 tahun 2016 tentang sertifikasi perangkat telekomunikasi Pesawat telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet bahwa legalnya sebuah perangkat telekomunikasi harus melalui tahapan sertifikasi perangkat. Hal tersebut bertujuan supaya masyarakat selaku konsumen terjamin atas produk *smartphone* yang aman. Pada *smartphone* ilegal, tidak melalui tahapan sertifikasi perangkat sehingga mutu keamanan produk tidak terjamin. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa dengan beredarnya produk *smartphone* ilegal maka terjadi pelanggaran terhadap hak konsumen terkait dengan hak atas keamanan.

- b. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya

Ciri utama produk *smartphone* ilegal adalah tidak memiliki kartu garansi dan layanan purna jual hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 tahun 2019 tentang ketentuan jaminan layanan purna jual bagi produk elektronik dan produk telematik yang disebutkan bahwa setiap produsen wajib

melengkapi setiap produk telekomunikasi seluler berupa petunjuk penggunaan dan kartu jaminan (garansi purna jual). Pada dasarnya kegunaan dari kartu garansi purna jual salah satunya adalah untuk memberikan jaminan ganti rugi kepada konsumen apabila produk mengalami kerusakan dalam dalam jangka waktu yang telah tercantum dalam kartu garansi.³⁹ Dalam hal ini pada produk *smartphone* ilegal tidak dilengkapi dengan kartu garansi purna jual, maka akibatnya apabila *smartphone* mengalami kerusakan maka tanggung jawab bukan lagi pada produsen (penjual) melainkan akan menjadi tanggungjawab sendiri (konsumen). Pada akhirnya akibat dari pembelian *smartphone* ilegal pada hak konsumen untuk mendapat ganti rugi tidak terpenuhi.

Selain melanggar hak konsumen, peredaran *smartphone* ilegal juga melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) poin a Undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) dimana:

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperjual-belikan barang/atau jasa yang tidak memenuhi standar yang telah dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan yang berlaku.”

Peraturan yang berlaku merujuk pada Pasal 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 tahun 2016 tentang

³⁹ Abdul Halim Barkatullah, “Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran”, (Bandung: Nusa Media), 2008. hlm. 22.

sertifikasi perangkat telekomunikasi pesawat telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet di sebutkan bahwa:

“Sebuah produk perangkat telekomunikasi seluler sebelum beredar di wilayah indonesia untuk diperdagangkan harus melalui tahapan sertifikasi perangkat”

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 108 tahun 2012 disebutkan bahwa setelah dilakukan tahapan sertifikasi, produk *smartphone* wajib mengajukan permohonan pendaftaran produknya baik pendaftaran produk produksi maupun pendaftaran pendaftaran produk import. Pendaftaran produk mencakup: tipe, nomor identitas setiap produk, dan jumlah produk yang akan diproduksi maupun di impor.

Kegiatan mengedarkan produk *smartphone* ilegal melalui perdagangan secara tidak langsung dilarang karena pada produk *smartphone* ilegal tidak melalui proses/ atau tahapan baik pendaftaran produk maupun sertifikasi perangkat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku sehingga melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-undang perlindungan konsumen (UUPK). Apabila tetap dilakukannya peredaran *smartphone* ilegal melalui perdagangan maka dapat dikenakan sanksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) yang mana disebutkan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 8 dapat dikenakan sanksi. Sanksi tersebut berupa pidana penjara paling

lama 5 (lima) tahun dan/ atau pidana denda sebanyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 tahun 2019 tentang Ketentuan Jaminan Layanan Purna Jual bagi Produk Elektronik dan Produk Telematika

Ketentuan jaminan layanan purna jual merupakan sebuah kartu jaminan yang diberikan pada konsumen selaku pembeli guna menjamin ketersediaan layanan purna jual apabila produk mengalami cacat/ atau kerusakan setelah pembelian produk. Disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (1) bahwa:

“Bahwa tiap-tiap produk telematika dan elektronika baik yang diproduksi maupun diimpor untuk di perjual belikan dalam negeri wajib dilengkapi dengan kartu jaminan (garansi) dan petunjuk penggunaan dengan bahasa Indonesia.”

Kartu jaminan atau biasa disebut kartu garansi pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) bahwa selama masa jaminan produsen dan/atau wajib menyediakan sekurang-kurangnya:

“(1) ketersediaan pusat layanan purna jual; (2) suku cadang; (3) penggantian suku cadang sesuai jaminan selama masa jaminan yang diperjanjikan; (4) nggantian

produk sejenis apabila terjadi kerusakan yang tidak dapat diperbaiki selama masa jaminan yang diperjanjikan.”

Pusat layanan purna jual dalam hal ini merupakan sebuah tempat yang disediakan oleh produsen atau importir untuk memberikan pelayanan kepada konsumen setelah pembelian produk telematika dan elektronika atas keluhan terkait kondisi produk yang dibeli. Pusat layanan purna jual menyediakan tenaga pelayanan, tenaga teknik yang kompeten, dan menyediakan komponen perangkat yang diperlukan untuk penggantian. Layanan purna jual diberikan paling sedikit 1 (satu) tahun setelah berakhirnya masa jaminan. Tujuan dari pemberian layanan purna juga untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsumen atas perlindungan dalam pembelian produk telematika dan elektronik guna menghindari kerugian. Kepemilikan kartu jaminan layanan purna jual didapat pada produk perangkat telekomunikasi khususnya *smartphone* apabila telah melalui tahapan sertifikasi perangkat dan pendaftaran produk, sehingga pada *smartphone* ilegal tidak memiliki kartu jaminan layanan purna jual.

Selain perangkat telekomunikasi wajib dilengkapi dengan kartu jaminan purna jual, dalam peraturan ini juga di sebutkan dalam Pasal 3A bahwasanya:

“Produsen, importir, dan pelaku usaha wajib menjamin teregistrasi dan tervalidasinya data International mobile

equipment identity (IMEI) pada perangkat telekomunikasi seluler.”

Validasinya data *international mobile equipment identity* (IMEI) pada perangkat telekomunikasi dalam database pemerintah apabila perangkat tersebut telah melalui tahapan sertifikasi dan pendaftaran produk sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada smartphone ilegal memiliki nomor *international mobile equipment identity* (IMEI) yang masuk dalam daftar hitam karena tidak terdaftar dalam database pemerintah.

Pasal 22 disebutkan bahwa produsen/ importir wajib melakukan penarikan produk apabila ditemukan berupa hal berikut:

- a) Produk elektronika dan telematika yang tidak dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, tidak adanya kartu jaminan purna jual, serta tidak dicantumkan nomor tanda pendaftaran.
- b) Produk elektronik dan telematika dilengkapi dengan kartu jaminan dan petunjuk penggunaan namun tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2), dimana pada petunjuk penggunaan sekurang-kurangnya harus mencantumkan:
 1. Nama dan alamat lengkap Produsen untuk produk dalam negeri;
 2. Nama dan alamat lengkap Importir untuk produk asal Impor;

3. Merek, jenis, serta tipe dan/atau model produk
4. Spesifikasi produk.
5. keterangan cara penggunaan se suai fungsi produk; dan
6. petunjuk pemeliharaan

Dan pada kartu jaminan sekurang-kurangnya harus mencantumkan:

1. Nama dan alamat lengkap Produsen untuk produk dalam negeri;
2. Nama dan alamat lengkap Importir untuk produk asal Impor;
3. Nama dan alamat lengkap Pusat Layanan Puma Jual;
4. Masa jaminan pelayanan puma jual yang memuat keterangan waktu paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pembelian produk oleh Konsumen; dan
5. Syarat dan kondisi jaminan pelayanan puma jual yang paling sedikit mengenai: 1) syarat berlaku dan batalnya jaminan; 2) prosedur pengajuan klaim jaminan; dan 3) jasa perbaikan yang dibebaskan dari biaya selama masa jaminan.
6. Cakupan atau daftar kerusakan yang dijamin; dan
7. Nomor telepon sebagai saluran komunikasi yang murah dan mudah diakses oleh Konsumen di seluruh wilayah Indonesia untuk menyampaikan informasi dan/atau

pengaduan terkait Produk Elektronika dan Produk Telematika yang beredar

- c) Data *international mobile equipment identity* (IMEI) khususnya pada *smartphone* tidak teregistrasi dan tervalidasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. dalam hal ini data IMEI pada *smartphone* tidak terdata pada database pemerintah.

Peredaran *smartphone* ilegal melalui perdagangan bertentangan dengan **Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 tahun 2019 tentang Ketentuan Jaminan Layanan Purna Jual bagi Produk Elektronik dan Produk Telematika**, karena: (1) pada *smartphone* ilegal tidak dilengkapi dengan kartu jaminan purna jual dan petunjuk penggunaan; (2) *smartphone* ilegal memiliki data *international mobile equipment identity* yang masuk dalam daftar hitam karena tidak tervalidasi dengan database pemerintah. Untuk itu menurut ketentuan Pasal 22 harus dilakukan sebuah penarikan oleh produsen dan/ atau importir dan apabila tidak dilakukan penarikan produk maka akan dikenakan sanksi administrasi pada produsen dan/ atau importir. Dasar hukum ditetapkan sanksi administrasi tertuang dalam Pasal 24 dimana:

“Pemberian sanksi administrasi pada produsen, importir, dan pelaku usaha apabila melanggar ketentuan pasal 22 akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha oleh

pejabat penerbit sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.”

Pencabutan izin usaha diberikan pada produsen, importir, dan pelaku usaha setelah dilakukan 3 (tiga) kali peringatan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari jam kerja. *Smartphone* ilegal dalam peraturan ini secara tidak langsung dilarang peredarannya karena bertentangan dengan beberapa pasal.

4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/ atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi *International Mobile Equipment Identity* (IMEI)

Identifikasi *International mobile equipment identity* (IMEI) merupakan sebuah proses menentukan dan menetapkan identitas sebuah perangkat telekomunikasi seluler. Identifikasi dilakukan melalui proses verifikasi dengan mencocokkan nomor *international mobile equipment identity* (IMEI) pada perangkat telekomunikasi seluler dengan data IMEI yang telah tersimpan pada database pemerintah. Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa:

“Tiap-tiap perangkat telekomunikasi seluler jenis HKT (handphone, komputer, dan tablet) wajib dilakukan sebuah verifikasi IMEI dengan mencocokkan IMEI perangkat telekomunikasi seluler dengan tanda pendaftaran produk

(TTP) oleh pemerintah sebelum diberikannya akses jaringan bergerak seluler.”

Dalam hal ini kewenangan untuk melakukan verifikasi data *international mobile equipment identity* (IMEI) diberikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kementerian komunikasi dan informatika (KOMINFO) selaku penyelenggara diwajibkan menyediakan sebuah sistem yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi data IMEI sebagaimana yang di sebutkan dalam Pasal 2 Ayat (1) bahwa:

“Penyelenggara wajib menyediakan sebuah sistem yang memiliki kemampuan untuk memberikan atau tidaknya akses jaringan bergerak seluler pada perangkat HKT (handphone, komputer, dan tablet).”

Sistem yang telah disediakan oleh penyelenggaran dalam pemenuhan peraturan tersebut adalah EIR dan CEIR. Equipment identity register (EIR) merupakan sebuah sistem yang dibuat untuk mengidentifikasi data IMEI dengan fungsi mencatat, menyimpan, memverifikasi, dan mentranskip data *international mobile equipment identity* (IMEI) ke CEIR. Sedangkan central equipment identity register (CEIR) merupakan sebuah pusat penyimpanan data IMEI. dalam hal ini CEIR memiliki fungsi menyimpan data IMEI dan pemberian akses blokir pada perangkat telekomunikasi seluler.

Pada perangkat telekomunikasi seluler yang tidak melalui proses sertifikasi dan pendaftaran produk dapat dipastikan memiliki IMEI yang tidak terdata pada *central equipment identity register* (CEIR) karena nomor *international mobile equipment identity* didapatkan melalui proses sertifikasi dan pendaftaran produk. Pasal 7 disebutkan bahwa:

“Penyelenggara yakni pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika akan melakukan sistem pemblokiran pada perangkat HKT (handphone, komputer, dan tablet) apabila:”

a. Perangkat HKT dengan IMEI tidak valid

Perangkat HKT dengan IMEI yang tidak terverifikasi melalui EIR dikarenakan tidak ada kecocokan pada kartu tanda pendaftaran produk (TPP) sehingga tidak terdaftar dalam sistem EIR dan CEIR.

b. Perangkat HKT dengan IMEI daftar hitam

Perangkat HKT dengan IMEI yang masuk dalam daftar abu-abu dan selama 90 (sembilan puluh) hari tidak dilakukan registrasi ulang akan dilakukan pemblokiran pada perangkat HKT, dimana perangkat HKT tidak mempunyai akses jaringan sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Berbeda dengan dua peraturan sebelumnya dimana pemberian sanksi ditujukan kepada produsen, importir dan pelaku usaha, pada peraturan ini larangan peredaran *smartphone* ilegal sanksi juga mengarah pada konsumen selaku pembeli dan pengguna perangkat komunikasi *smartphone*. Kepada konsumen yang tetap membeli *smartphone* ilegal setelah peraturan

Peraturan ini berfokus pada pemberian dan/atau pembatasan akses jaringan bergerak seluler guna membrantas peredaran *smartphone* ilegal. Berbeda dengan peraturan sebelumnya yang sanksinya hanya merujuk pada pelaku usaha, pada peraturan ini sanksi juga mengarah kepada konsumen khususnya bagi konsumen yang tetap membeli *smartphone* ilegal setelah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/ atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) diberlakukan yakni setelah tanggal 18 April 2020 maka *smartphone* akan dikenakan blokir sistem, dimana *smartphone* akan dibatasi akses jaringan bergerak sehingga tidak dapat digunakan untuk melakukan panggilan suara, mengirim pesan, dan mengakses internet.

Pengaturan larangan peredaran *smartphone* ilegal di Indonesia pada dasarnya dalam perkembangannya memiliki satu tujuan yang sama yakni memberantas peredaran *smartphone* ilegal dengan diwujudkan melalui ke 3

(tiga) pengaturan diatas dengan sanksi yang berbeda-beda dari mulai pengenaan sanksi pidana penjara dan denda pada produsen, importir dan pelaku usaha yang mengedarkan smartphone ilegal melalui perdagangan. sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha pada pelaku usaha, sampai dengan yang terakhir pengenaan sanksi pada konsumen berupa pembatasan akses jaringan bergerak seluler semata-mata untuk mewujudkan sebuah tujuan hukum yakni: (1) Memberikan kepastian hukum untuk konsumen dan pelaku usaha; (2) Kemanfaatan bagi konsumen agar dapat terhindar dari peredaran smartphone ilegal, bagi pelaku usaha agar terhindar dari persaingan perdagangan tidak sehat antar pelaku usaha perangkat telekomunikasi seluler smartphone, bagi negara guna mengurangi kerugian negara akibat peredaran smartphone ilegal.

B. Implikasi Hukum Proses *Validasi International Mobile Equipment Identity (IMEI)* Terhadap *Smartphone Ilegal*

Validasi *international mobile equipment identity* (IMEI) merupakan pengindetifikasian nomor IMEI pada smartphone melalui pencocokan data *international mobile equipment identity* (IMEI) dengan nomor pendaftaran produk yang telah tersimpan dalam database Kementerian Perindustrian. Tujuan dari validasi ini agar dapat mengelompokkan daftar IMEI smartphone yang tersebar di Indonesia menjadi kelompok daftar putih, notifikasi, dan daftar hitam guna dilakukannya penindakan hukum terhadap peredaran smartphone ilegal di Indonesia. pengaturan peredaran smartphone di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi

dan Informatika Nomor 23 tahun 2016 tentang sertifikasi perangkat telekomunikasi telepon seluler, komputer genggam dan komputer tablet dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 108 tahun 2012 tentang pendaftaran produk telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet bahwasanya apabila produk perangkat telekomunikasi seluler *smartphone* sebelum diedarkan di wilayah Indonesia maka harus melalui tahapan sertifikasi dan pendaftaran produk. larangan peredaran *smartphone* ilegal dengan ancaman sanksi juga telah ada, namun nyatanya belum mampu dalam meretas peredaran *smartphone* ilegal di Indonesia.

Pada siaran pers teranggal 18 Oktober 2019 Kementrian Perindustrian menegaskan bahwa jumlah *smartphone* ilegal yang beredar di Indonesia menunjukkan angka 9 (sembilan) sampai 10 (sepuluh) juta unit pertahun dengan total kerugian 2,81 (dua koma delapan pulu satu) triliun pertahun menunjukan bahwa peraturan yang telah diterapkan belum mampu mengatasi permasalahan peredaran *smartphone* ilegal di Indonesia.⁴⁰ Dalam hal ini teori penegakan hukum milik Max Weber sangat tepat untuk menjawab keadaan tersebut. Max Weber pada teorinya menyatakan bahwa penegakan hukum pada suatu masa berbeda dengan penegakan hukum pada masa yang lain, sebab perkembangan sosial dari masyarakatnya juga, supaya suatu penegakan hukum bisa diselenggarakan, diperlukan

⁴⁰ Airlangga Hartato, *Perangi Ponsel Ilegal Tiga Menteri Taken Aturan Bersama*, Siaran Pers Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, <https://kemenperin.go.id/artikel/21160/Perangi-Ponsel-Ilegal,-Tiga-Menteri-Teken-Aturan-Bersama>.

perlengkapan sosial tertentu.⁴¹ Bahwasnya penegakan hukum kerap mengalami pembaharuan dari masa ke masa sebab perkembangan sosial dari masyarakatnya, hal tersebut bertujuan supaya suatu penegakan hukum dapat di selenggarakan ketika keadaan sedang membutuhkan. Keadaan dimana sebuah atauran hukum tidak mampu menyelesaikan sebuah permasalahan maka perlu adanya pembaharuan hukum berupa mengubah peraturan terdahulu atau dengan membuat peraturan baru. Dalam hal ini pemerintah melalui pendekatan teknologi dalam mengatasi permasalahan *smartphone* ilegal memilih opsi kedua dengan membuat dan menyusun sebuah peraturan baru untuk menguatkan aturan terdahulu.

Untuk melindungi masyarakat dari penggunaan perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan mencegah serta mengurangi peredaran perangkat telekomunikasi ilegal yang masuk ke Indonesia, Pemerintah melalui tiga kementerian yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan pada 18 April 2020 telah memberlakukan 3 (tiga) peraturan menteri masing-masing kementerian terkait pengaturan IMEI (*International Mobile Equipment Identity*). Pemerintah membuat sebuah regulasi validasi *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) melalui 3 (tiga) menteri yakni Kementrian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perindustrian dan Kementrian Perdagangan 3 aturan terkait validasi *International mobile*

⁴¹ Ade Saptomo, *Awal Memahami Hukum Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Jakarta: FHUP Press, 2015, hlm. 27.

equipment identity (IMEI) yakni Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Sistem Berbasis Data Identitas Perangkat Telekomunikasi Bergerak, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tentang Pengendalian Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung Ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi *International Mobile Equipment Identity* (IMEI), dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Purna Jual Bagi Produk Elektronika dan Telematika. Ke tiga peraturan tersebut mengatur terkait pengendalian perangkat telekomunikasi seluler melalui validasi *International mobile equipment Identity* (IMEI).

Pemerintah memiliki tujuan dari penerapan regulasi validasi IMEI yakni peraturan validasi IMEI, yakni sebagai berikut: (1) Mengurangi angka peredaran smartphone ilegal di wilayah kesatuan republik Indonesia; (2) Memberikan kesadaran bagi masyarakat selaku konsumen agar membeli produk smartpone legal yang dijual pada distributor resmi guna meningkatkan perlindungan pada pengguna/ konsumen perangkat telekomunikasi smartphone dari perangkat yang tidak memenuhi standar nasional. sehingga dapat terhindar dari smartphone dengan mutu rendah; (3) Menciptakan sebuah kondisi perdagangan yang sehat antar distridutor perangkat telekomunikasi smartphone; (4) meminimalisir kejahatan tindak pidana pencurian perangkat telekomunikasi seluler smartphone; (5)

Mengurangi kerugian negara akibat smartphone ilegal yang tidak dilakukan pendaftaran tanda produk.

Berikut merupakan Implikasi hukum proses validasi *international mobile equipment identity* (IMEI) terhadap smartphone ilegal melalui 3 (tiga) tahapan yang disebut sitem DIRBS yakni:

1. *Device Identification* (Tahap Indentifikasi)

Pada tahap ini tiap-tiap *smartphone* akan dilakukan sebuah verifikasi data IMEI. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tentang Pengendalian Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung Ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi International Mobile Equipment Identity (IMEI), bahwa:

“Verifikasi dilaksanakan dengan melakukan identifikasi perangkat telekomunikikasi seluler (smartphone) oleh CEIR melalui pencocokan IMEI smartphone dengan data tanda pendaftaran produk (TTP).”

Tanda pendaftaran produk (TTP) yang dimaksud adalah pendaftaran produk smartphone yang mencakup pendaftaran tipe, nomor identitas perangkat setiap produk, dan jumlah produk yang di produksi dan/atau import. Disebutkan bahwa sebuah produk smartphone yang akan diedarkan di wilayah indonesia harus di daftarkan pada Kementrian Perindustrian melalui pengajuan pendaftaran produk. Menurut ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 108 tahun

2012 tentang Pendaftaran Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan komputer Tablet disebutkan bahwa jenis pendaftaran produk terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

3.) Tanda Pendaftaran Produk-Produksi (TPP-Produksi)

TPP-Produksi digunakan pada *smartphone* lokal hasil produksi, dimana permohonan TPP-Produksi oleh perusahaan pemohon wajib melengkapi:

- d. sertifikat merek atau tanda merek dari direktur jenderal hak kekayaan intelektual, kementerian Hukum dan HAM, pada merek yang diproduksi merupakan merek milik perusahaan pemohon,
- e. perjanjian lisensi merek dan pemegang merek atas produk yang telah didaftarkan pada direktur jenderal Hak kekayaan intelektual, Kementerian Hukum dan HAM.
- f. Perjanjian kerjasama teknis dengan pemegang merek atas produk yang akan diproduksi

4.) Tanda Pendaftaran Produk-Import (TPP-Import)

Pada Pendaftaran Produk-Import (TPP-Import) berlaku pada produk *smartphone import*/ di datangkan dari luar negeri. Khusus untuk perusahaan pemohon TPP-Import wajib mempunyai bukti-bukti sebagai importir di Indonesia dari prinsipal pemegang merek atas produk yang diimport.

TPP-Produksi merupakan sebuah dasar acuan dapat atau/ tidaknya sebuah smartphone diproduksi di wilayah Indonesia. Begitu juga pada TPP-Import digunakan sebagai dasar pertimbangan dan syarat penerbitan atas smartphone agar dapat diperdagangkan di wilayah Indonesia. Untuk itu terhadap *smartphone* yang terdaftar dalam database kementerian perindustrian sudah dipastikan memiliki IMEI yang valid.

Pada tahapan verifikasi IMEI sistematikanya adalah menyingkronisasi data IMEI dengan nomor tanda pendaftarah produk (TPP) melalui sistem CEIR. setelah data IMEI di singkronisasi dengan nomor TTP, dalam sistem CEIR smartphone akan di kelompokkan dalam 3 (tiga) daftar yakni:

a. Daftar putih

Pada data IMEI yang tergolong dalam daftar putih merupakan IMEI yang falid terdaftar sesuai tanda pendaftaran produk (TPP). produk telekomunikasi yang mempunyai imei daftar putih dapat dipastikan produk tersebut legal karena telah terdata di sistem database pemerintah.

b. Daftar Abu-abu/ Notifikasi

Data IMEI yang tergolong daftar notifikasi merupakan data IMEI yang tidak terdaftar dalam EIR karena produk telekomunikasi seluler terdeteksi tidak terdaftar sesuai dengan tanda pendaftaran produk (TPP). Pada produk telekomunikasi

yang tergolong dalam daftar notifikasi berdasarkan pasal 6 ayat (4) oleh penyelenggara layanan seluler akan menyampaikan kepada pengguna layanan seluler (konsumen) atas status data IMEI nya dan diberi waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak penyampaian daftar notifikasi untuk melakukan registrasi ulang melalui instansi terkait.

c. Daftar hitam

Data IMEI yang tergolong dalam daftar hitam merupakan data imei berstatus daftar abu-abu/notifikasi yang selama jangka waktu 90 hari setelah penyampaian oleh penyelenggara tidak dilakukan registrasi ulang. Pada daftar hitam berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) akan di proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan komunikasi

Terkait identifikasi IMEI smartpohe oleh KOMINFO akan menyampaikan kepada pengguna *smartphone* melalui *broadcase message* terkait status IMEI *smartphone*. Ketiga daftar tersebut yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan acuan untuk proses identifikasi IMEI *smartphone* untuk diberikan atau tidaknya akses layanan jaringan bergerak sesuai peraturan yang berlaku.

2. *Registration* (Tahap Registrasi)

Pada tahap registrasi diberlakukan pada IMEI *smartphone* yang masuk dalam daftar notifikasi dimana dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah menerima pemberitahuan terkait status IMIE *smartphone*. IMEI *smartphone* yang tergolong dalam daftar abu-abu/ notifikasi yakni:

a. *Smartphone* dengan data IMEI tidak valid

yang tidak sesuai dengan basis data IMEI nasional/ tidak ada kecocokan dengan tanda pendaftaran produk (TTP).
dimana IMEI

b. *Smartphone* yang di beli diluar negeri

Pada *smartphone* yang dibeli diluar negeri dan tidak didaftarkan/ membayar pajak bea masuk akan akan tergolong *smartphone* dengan IMEI daftar notifikasi.

c. *Smartphone* milik wisatawan asing yang sedang berkunjung di indonesia

Pada *smartphone* milik wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia akan tetap diberikan akses jaringan bergerak selama 90 (sembilan puluh) hari. dan dalam kurun waktu tersebut *smartphone* masuk dalam daftar notifikasi.

Agar tidak dilakukan pemblokiran maka IMEI *smartphone* harus di registrasi ulang. registrasi dilakukan melalui layanan service care yang di sediakan oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika, dan

pada *smartphone* yang dibeli diluar negeri dan milik wisatawan asing dapat registrasi IMEI melalui kantor bea cukai terdekat dengan menunjukkan bukti-bukti kepemilikan *smartphone*.

3. *Blocking System* (Tahap Pemblokiran)

Tahapan ini merupakan puncak dari pengaturan validasi *international mobile equipment identity* (IMEI) dimana pada *smartphone* yang terdeteksi merupakan produk ilegal dapat dikenakan sistem pemblokiran, dimana *smartphone* tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tentang Pengendalian Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung Ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) bahwa setelah diberlakukannya regulasi validasi IMEI, penyelenggara dalam artian pemerintah atau instansi yang terkait wajib memberikan pemblokiran/ pembatasan akses jaringan bergerak pada:

a. *Smartphone* dengan IMEI tidak valid

Smartphone dengan IMEI tidak valid yakni IMEI yang tidak terverifikasi melalui sistem central equipment identity register (CEIR). Hal tersebut dikarenakan adanya ketidakcocokan antara identitas IMEI dengan kartu tanda pendaftaran produk (TPP). ketidakcocokan antar IMEI dengan TPP biasanya, *smartphone* tersebut tidak melalui proses legalitas sebuah perangkat

telekomunikasi seluler berupa sertifikasi perangkat seluler dan pendaftaran produk sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 tahun 2016 tentang sertifikasi perangkat telekomunikasi pesawat telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 108 tahun 2012 tentang Pendaftaran Pendaftaran Produk Telepon Seluler, komputer genggam, dan komputer tablet.

b. *Smartphone* dengan IMEI daftar hitam

Smartphone dengan IMEI yang masuk dalam daftar notifikasi dan selama 90 (sembilan puluh) hari tidak dilakukan registrasi ulang akan dilakukan pemblokiran pada smartphone tersebut. Data IMEI yang tergolong dalam daftar hitam merupakan data imei berstatus daftar notifikasi yang selama jangka waktu 90 hari setelah menyampaikan status IMEI oleh penyelenggara tidak dilakukan registrasi ulang. Pada daftar hitam berdasarkan ketentuan yang berlaku akan dilakukan proses pemblokiran/ atau pembatasan pada akses jaringan seluler.

c. *Smartphone* yang dimohonkan pembatasan

Yakni dimana pengguna *smartphone* dapat mengajukan permohonan untuk memblokir IMEI pada *smartphone* yang dicuri/atau hilang untuk dikeluarkan dari daftar putih dan dimasukkan ke daftar hitam untuk dilakukan pemblokiran.

permohonan dengan syarat melampirkan laporan kehilangan/ atau kecurian dari aparat penegak hukum yang berwenang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tentang Pengendalian Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung Ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi *International Mobile Equipment Identity* (IMEI), pengecualian atas daftar blokir pada smartphone yakni pada:

a. Perangkat HKT yang memiliki IMEI valid

Yaitu perangkat HKT yang telah terverifikasi dan masuk kedalam kelompok daftar putih dimana merupakan sebuah perangkat yang mempunyai IMEI valid sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Perangkat HKT dengan IMEI daftar abu-abu

Pada perangkat HKT berstatus daftar abu-abu akan tetap diberikan akses jaringan bergerak selama 90 (sembilan puluh) hari setelah penyampaian status IMEI perangkat HKT oleh EIR. Penyampaian status akan dikirim melalui *broadcast message* oleh Kementerian Telekomunikasi dan Informasi (KOMINFO) pada perangkat telekomunikasi yang bersangkutan. Dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari akan tetap diberikan akses jaringan bergerak lebih dari itu perangkat akan diblokir sepenuhnya. Agar tetap diberikan akses jaringan bergerak maka pemilik atau konsumen harus mendaftarkan ulang perangkat

HKT tersebut pada kantor bea cukai terdekat untuk mendaftarkan ulang IMEI.

c. Perangkat HKT yang aktif sebelum regulasi IMEI berlaku

Perangkat HKT yang aktif sebelum regulasi IMEI berlaku akan baik yang IMEI nya masuk kedalam daftar putih, abu-abu, dan hitam tetap diberikan akses jaringan bergerak. hal tersebut bertujuan agar pengguna selaku konsumen tidak merasa dirugikan dengan lahirnya regulasi validasi IMEI.

d. Perangkat HKT milik perwakilan negara asing

Pada perangkat HKT yang dimiliki oleh perwakilan atau pejabat negara yang sedang berkunjung dan/atau bertugas di Indonesia akan tetap diberikan akses jaringan bergerak.

e. Perangkat HKT milik wisatawan asing

Wisatawan asing yang dimaksud adalah warga negara asing yang sedang berlibur/ berwisata di Indonesia. pada perangkat HKT milik wisatawan asing akan di kategorikan ke dalam daftar abu-abu, dimana perangkat HKT akan di berikan akses jaringan bergerak selama 90 (sembilan puluh) hari dan setelahnya apabila tidak melakukan registrasi ulang akan di berlakukan sistem blocking.

Ketentuan pemblokiran IMEI pada *smartphone* hanya berlaku pada *smartphone* yang baru di beli atau di aktifkan setelah peraturan validasi international mobile equipment identity (IMEI) diberlakukan, tepatnya

setelah tanggal 18 April 2020. Pada *smartphone* yang telah aktif sebelum tanggal tersebut tidak akan terdampak pemblokiran walaupun *smartphone* tersebut dengan nomor *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) daftar hitam. Bahkan dalam pasal 14 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tentang Pengendalian Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung Ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) disebutkan bahwa *smartphone* yang terkena dampak pemblokiran/ atau pembatasan akses jaringan bergerak setelah di berlakukannya regulasi validasi *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) dapat mengajukan permohonan pemberian akses jaringan/ pembukaan blokir melalui layanan customer care dengan ketentuan perangkat seluler *smartphone* telah dimiliki oleh perorangan sebelum peraturan regulasi IMEI berlaku dan permohonan pemberian akses jaringan bergerak di ajukan paling lambat 31 Agustus 2020. Terhadap regulasi validasi *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) masyarakat tidak perlu khawatir apabila *smartphone* yang telah dimiliki jauh sebelum regulasi validasi IMEI di berlakukan tidak terdaftar dalam database pemerintah, maka tidak akan di berlakukan sistem blokir pada *smartphone* tersebut. yang perlu dilakukan oleh masyarakat selaku konsumen setelah diberlakukannya regulasi validasi *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) ini adalah lebih hati-hati dalam membeli perangkat telekomunikasi seluler *smartphone*. Hindari pembelian *smartphone* ilegal atau pembelian pada distributor tidak resmi usahakan

sebelum membeli produk *smartphone* tanyakan terlebih dahulu akan informasi identitas *smartphone* jika tidak ingin terkena blokir sistem, karena pada *smartphone* yang terkena blokir sistem tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. *Smartphone* ilegal merupakan sebuah produk *smartphone* yang tidak melalui tahapan sertifikasi perangkat dan pendaftaran produk sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terkait dengan pengaturan larangan peredaran *smartphone* ilegal di Indonesia, sanksi yang diterapkan menasar produsen/pelaku usaha antara lain sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha dan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun serta denda Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah). Berlakunya pengaturan regulasi *International mobile equipment identity* (IMEI) pada tanggal 18 April 2020 sanksi akan larangan peredaran *smartphone* ilegal tidak hanya sanksi yang menasar pada produsen/pelaku usaha tetapi juga menasar masyarakat selaku konsumen dengan sistem pemblokiran *smartphone* ilegal melalui pembatasan akses layanan jaringan seluler pada *smartphone*. Pengenaan sanksi tersebut semata-mata untuk mewujudkan sebuah tujuan hukum yakni: (1) Memberikan kepastian hukum untuk konsumen dan pelaku usaha; (2) Kemanfaatan bagi konsumen agar dapat terhindar dari peredaran *smartphone* ilegal, bagi pelaku usaha agar terhindar dari persaingan perdagangan tidak sehat antar pelaku usaha perangkat telekomunikasi seluler *smartphone*, bagi negara guna mengurangi kerugian negara akibat peredaran *smartphone* ilegal.

1. Pengaturan *Validasi Internatioanal Mobile Equipment Identity* (IMEI) mencakup 3 (tiga) peraturan yakni Peraturan Menteri Perindustrian , Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Peraturan Menteri Perdagangan. Terkait Implikasi hukum proses validasi IMEI terhadap *smartphone* ilegal melalui validasi IMEI menggunakan 3 (tiga) tahapan yakni: (1) Tahap identifikasi, mengelompokkan daftar IMEI menjadi daftar putih, notifikasi dan hitam; (2) Tahap registrasi, pendaftaran ulang pada IMEI daftar notifikasi; (3) Tahap pemblokiran, IMIE pada *smartphone* dengan daftar notifikasi yang dalam kurun waktu 90 hari tidak melakukan registrasi ulang akan dikenakan blokir sistem melalui pembatasan akses layanan jaringan seluler pada *smartphone*. kekhawatiran masyarakat akan kerugian akibat dampak penerapan aturan tersebut nyatanya tidak terbukti. Tidak akan ada yang dirugikan karena apabila *smartphone* yang telah dimiliki jauh sebelum regulasi validasi IMEI di berlakukan tidak terdaftar dalam database pemerintah, maka tidak akan di berlakukan sistem blokir pada *smartphone* tersebut. dan apabila terlanjur membeli *smartphone* dengan IMEI tidak valid agar tidak terkena dampak pembatasan akses jaringan seluler maka dapat di atasi dengan mendaftarkan *smartphone* tersebut pada kantor bea cukai terdekat, cara tersebut juga berlaku pada pelaku usaha yang menjual *smartphone* ilegal guna menghindari kerugian.

B. Saran

dalam penelitian ini ada 2 saran yang akan di tujukan yakni:

1. Bagi Pemerintah

Pengaturan regulasi *internatiaonal mobile equipment* (IMEI) sudah sangat baik untuk menekan angka peredaran *smartphone* ilegal, namun Pemerinta perlu berkaca dari pengaturan SIM card beberapa waktu lalu agar pengaturan Validai IMEI terimplementasi dengan baik agar tidak di serang balik kegunaan oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab.

2. Bagi Masyarakat selaku konsumen

Untuk terwujudnya sebuah pereaturan agar berjalan sesuai dengan apa yang dicitakan, perlunya peranan masyarakat guna mensukseskan kebijakan pemerintah untuk itu bagi masyarakat hendaklah mendukung kebijakan pemerintah terkait regulasi validasi internasional mobile equipment identity (IMEI) ini dengan melalui membiasakan diri untuk lebih teliti dalam membeli produk, usahakan dengan membeli produk-produk legal yang seusai dengan ketentuan peraturan yang berlaku untuk mendukung pemerintah dalam mensejahterakan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Arif Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kenana Prenada Media Group, 2007.
- Asshidiqie Jimly, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006.
- Azmi Riza, *Peta dan Potensi Industri Perangkat Telekomunikasi Seluler Indonesia*, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementrian Komunikasi dan Informatika”, 2014.
- Barkatullah Abdul Halim, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Bandung: Nusa Media, 2016.
- Dandrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi*, Jakarta: Refika Aditama, 2016.
- Halim Barkatulah Abdul, *Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, (Bandung: Nusa Media), 2008.
- Jacob Oetama, *Sejarah Perangkat Telekomunikasi (HKT)*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Efendi Jonaedi, Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, Cet. Ke- 2.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Mahmud Marzuki Peter, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Praptono Eddhie, *Pengantar Ilmu Hukum*, Tegal: Badan Penyedia Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2016.
- Prodjodikoro R. Wirjono, *Azaz-azaz Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Raharjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Saloko Angger, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Badan Penyedia Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara, 2007.
- Soekanto Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum Normatif Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Suwandono Agus, *Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Locus Tiara Wicara, 2017.

Suwiryo Djoko, *Kerangka Perangkat Telekomunikasi (HKT)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.

Tumijo Latif, *Legalitas Perangkat Telekomunikasi di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Kencana, Cetakan Ke-2, 2016.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013,

Sumber Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Komsunen

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 tahun 2016 tentang Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi Pesawat Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 1 tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui IMEI terkait *validasi International Mobile Equipment Identity (IMEI)*

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 108 tahun 2012 tentang Pendaftaran Produk Telepon Seluler, Komputer Genggang, Komputer tablet

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 tahun 2019 tentang Sistem Basis Data Identitas Perangkat Telekomunikasi Bergerak serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

Peraturan Menteri Perdagangan No. 78 tahun 2019 tentang Perubahan Permendag Nomor 38 Tahun 2019 tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika

Sumber Jurnal

Ade Saputra Ahmad, 2017, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat beredarnya Penjualan Elektronik Handphone Jenis Replika dan Paraller Import (Black Market) di Kota Pekan Baru*”, *JOM Fakultas Hukum Vol.III/No. 1- Februari 2016*.

Adivon, Failafus Septanu, “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjualan Telepon Seluler Replika*”, *Jurnal Universitas Brawijaya Malang*, 2015.

Caroline Eunike Tanor Susana, "Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Menjual Produk Impor ilegal Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", Lex Crimen Vol. VI/No. 9- November 2017.

Frando Vincentius Dengdeng Mario, "Pembelian Barang di Tinjau Dari UU NO.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", Lex Et Societatis Vol. VII/No. 4 – April 2019.

Prawira Buana Andika, "Implikasi Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Telepon Seluler Ilegal (Black Market)", JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Vol. 6/ No. 1 – 1 September 2020.

Surat Kabar/ Artikel

Bernadinus Adi Pamungkas, *Ponsel BM mulai diblokir Tahun Depan, Sudah Cek IMEI Ponselmu?*, Warta Ekonomi, <https://m.wartaekonomi.co.id/berita259944/ponsel-bm-mulai-diblokir-tahun-depan-sudah-cek-imei-ponselmu>, 5 Desember 2019.

Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, "Pemerintah Jalankan Blocking Penuh IMEI Perangkat telekomunikasi", [kontan.co.id](https://amp.kontan.co.id/release/pemerintah-jalankan-blocking-penuh-pengendalian-imei-perangkat-telekomunikasi), <https://amp.kontan.co.id/release/pemerintah-jalankan-blocking-penuh-pengendalian-imei-perangkat-telekomunikasi>, 16 September 2020.

Oktaviani Aurelia, "Hukuman Jika Ponsel Tidak Terdaftar resmi", Hukumonline, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5db6914f2ff86/hukumnya-jika-ponsel-tidak-terdaftar-resmi>, 31 Oktober 2019.

Setu Ferdinandus, "Lindungi Masyarakat, Pemerintah Terapkan Pengendalian IMEI Perangkat Telekomunikasi" Siaran Pers No. 206 /HM/KOMINFO/11/2019, Kominfo, <https://kominfo.go.id/index.php/-tentang-lindungi-masyarakat-pemerintah-terapkan-pengendalian-imei>, 12 November 2019.

Thoma Fabian Vincent, "YLKI: Penerapan IMEI Bisa Bantu Lindungi Konsumen Pengguna Ponsel", Tirto.id, <https://tirto.id/ylki-penerapan-imei-bisa-bantu-lindungi-konsumen-pengguna-ponsel-edy6>, 14 Juli 2019.

Yusuf, "Dirjen SDPPI: Pengendalian IMEI Lindungi Konsumen Perangkat HKT", Berita Kementrian Kominfo, https://www.kominfo.go.id/content/detail/29762/dirjen-sdppi-pengendalian-imei-lindungi-konsumen-perangkat-hkt/0/berita_satker, 29 September 2020

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ervine Yumitvamiati Putri

NPM : 5117500045

Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 30 Mei 1999

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Jalan Pelita2 Rt.02/Rw.02 Desa Dinuk
Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal

Riwayat Pendidikan :

No.	Nama Sekolah	Tahun Masuk	Tahun Lulus
1	SD Negeri Dinuk	2006	2011
2	SMP Negeri 12 Tegal	2011	2014
3	SMA Negeri 2 Tegal	2014	2017
4	SI Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal	2017	2021

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Tegal, 1 Januari 2021

Penulis

Pennills

Ervine Yumitvamiati Putri



SALINAN

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PENGENDALIAN ALAT DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI YANG
TERSAMBUNG KE JARINGAN BERGERAK SELULER MELALUI IDENTIFIKASI
INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan kepada masyarakat dari penggunaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan/atau hasil kejahatan serta mendukung pencegahan dan mengurangi peredaran alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang dinyatakan ilegal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan pengendalian alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang tersambung ke jaringan bergerak seluler melalui identifikasi *International Mobile Equipment Identity*;

- b. bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler melalui Identifikasi *International Mobile Equipment Identity* belum dapat menampung kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler melalui Identifikasi *International Mobile Equipment Identity*;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019);

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1801);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENGENDALIAN ALAT DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI YANG TERSAMBUNG KE JARINGAN BERGERAK SELULER MELALUI IDENTIFIKASI *INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Jenis *Handphone*, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet yang selanjutnya disebut Alat dan/atau Perangkat HKT adalah perangkat telekomunikasi telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet yang berbasis *Subscriber Identification Module*.
2. Pengguna Alat dan/atau Perangkat HKT yang selanjutnya disebut Pengguna HKT adalah pemakai Alat dan/atau Perangkat HKT yang tersambung ke jaringan bergerak seluler.
3. Penyelenggara adalah penyelenggara jaringan bergerak seluler.
4. *International Mobile Equipment Identity* yang selanjutnya disingkat IMEI adalah nomor identitas internasional yang terdiri dari 15 (lima belas) digit, dihasilkan dari 8 (delapan) digit *Type Allocation Code* yang dialokasikan oleh *Global System for Mobile Association* untuk mengidentifikasi secara unik Alat dan/atau Perangkat HKT yang tersambung ke jaringan bergerak seluler.
5. *International Mobile Subscriber Identity* yang selanjutnya disingkat IMSI adalah rangkaian nomor yang terdiri dari 15 (lima belas) digit kode unik secara internasional yang digunakan untuk mengidentifikasikan Pengguna HKT dalam sebuah jaringan *Global System for Mobile Communication*.

6. *Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number* yang selanjutnya disingkat MSISDN adalah nomor identitas Pengguna HKT yang bersifat unik dan merupakan nomor Pengguna HKT yang terdaftar di jaringan *Global System for Mobile Communication*.
7. *Central Equipment Identity Register* yang selanjutnya disingkat CEIR adalah perangkat atau sistem yang menghubungkan, mengkoordinasikan dan menyinkronkan EIR seluruh Penyelenggara secara *online* serta merupakan pusat referensi data IMEI yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
8. *Equipment Identity Register* yang selanjutnya disingkat EIR adalah perangkat atau sistem pada Penyelenggara yang memiliki kemampuan untuk memberikan Akses Jaringan Bergerak Seluler dan melakukan pembatasan Akses Jaringan Bergerak Seluler berdasarkan Identifikasi IMEI pada jaringan bergerak seluler.
9. Akses Jaringan Bergerak Seluler adalah ketersambungan Alat dan/atau Perangkat HKT ke jaringan Penyelenggara yang mengakibatkan Alat dan/atau Perangkat HKT dapat menerima layanan telekomunikasi bergerak seluler.
10. Daftar Putih adalah daftar yang mengandung kumpulan data IMEI Alat dan/atau Perangkat HKT yang mendapatkan Akses Jaringan Bergerak Seluler.
11. Daftar Hitam adalah daftar yang mengandung kumpulan data IMEI Alat dan/atau Perangkat HKT yang tidak mendapatkan Akses Jaringan Bergerak Seluler.
12. Daftar Abu-abu adalah daftar yang mengandung kumpulan data IMEI Alat dan/atau Perangkat HKT selain yang terdapat dalam Daftar Putih dan Daftar Hitam yang tetap diberikan Akses Jaringan Bergerak Seluler sesuai batas waktu tertentu dan/atau ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
13. Identifikasi adalah proses menentukan atau menetapkan identitas Alat dan/atau Perangkat HKT.

14. Verifikasi adalah proses pencocokan IMEI Alat dan/atau Perangkat HKT Pengguna HKT dengan data IMEI yang terdapat dalam EIR dan/atau CEIR yang dilakukan secara otomatis melalui sistem Penyelenggara.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

BAB II

PELAKSANAAN IDENTIFIKASI IMEI PADA ALAT DAN/ATAU PERANGKAT HKT YANG TERSAMBUNG KE JARINGAN BERGERAK SELULER

Pasal 2

- (1) Penyelenggara wajib menyediakan sistem berupa EIR yang memiliki kemampuan untuk memberikan dan tidak memberikan Akses Jaringan Bergerak Seluler ke Alat dan/atau Perangkat HKT serta terhubung dengan CEIR.
- (2) EIR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh masing-masing Penyelenggara secara mandiri dan dikelola serta dioperasikan secara mandiri oleh Penyelenggara.
- (3) EIR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi paling sedikit:
 - a. mencatat, menyimpan, memverifikasi, dan mengirimkan data triplet berupa IMEI, IMSI, dan MSISDN Alat dan/atau Perangkat HKT yang terenkripsi ke CEIR;
 - b. memberikan Akses Jaringan Bergerak Seluler dan membatasi Akses Jaringan Bergerak Seluler milik Penyelenggara berdasarkan Daftar Putih, Daftar Hitam dan Daftar Abu-abu;
 - c. melakukan sinkronisasi Daftar Putih, Daftar Hitam, dan Daftar Abu-abu dengan CEIR secara waktu yang sebenarnya (*real time*); dan

- d. memberikan informasi kepada Pengguna HKT mengenai status IMEI Alat dan/atau Perangkat HKT yang mengacu pada basis data masing-masing Penyelenggara.
- (4) CEIR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan untuk melakukan identifikasi, verifikasi dan analisis terhadap Alat dan/atau Perangkat HKT termasuk namun tidak terbatas pada fungsi:
- a. menyediakan antar muka (*interface*) dan *Application Programming Interface* (API) untuk kepentingan registrasi IMEI Alat dan/atau Perangkat HKT;
 - b. melakukan pengendalian dan penyeragaman fungsi EIR yang dioperasikan dan dikelola oleh Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki fasilitas untuk mengakses basis data IMEI *Global System for Mobile Communications Association*;
 - d. menyimpan basis data triplet berupa IMEI, IMSI dan MSISDN yang terenkripsi untuk dianalisis dan disinkronisasi dengan EIR dalam Daftar Putih, Daftar Hitam, dan Daftar Abu-abu;
 - e. melakukan deteksi dan *blocking* IMEI duplikasi pada Penyelenggara maupun duplikasi antar Penyelenggara;
 - f. melakukan perekaman aktifitas CEIR dan EIR;
 - g. menyediakan fungsi dan analisis *reporting* CEIR;
 - h. menyiapkan keterhubungan dengan sistem pihak ketiga untuk kepentingan operasional CEIR;
 - i. menyiapkan dan menyimpan rekaman jejak perubahan triplet berupa data IMEI, IMSI dan MSISDN;
 - j. menyiapkan fitur *force blocking* dan *unblocking* berdasarkan permintaan Pemerintah;

- k. menyediakan fitur *blocking* untuk Alat dan/atau Perangkat HKT yang dilaporkan hilang atau dicuri serta fitur *unblocking* untuk Alat dan/atau Perangkat HKT yang telah ditemukan kembali;
 - l. menyediakan aplikasi *web* untuk cek IMEI;
 - m. memasang dan memisahkan IMEI dengan MSISDN dan IMSI; dan
 - n. membedakan Alat dan/atau Perangkat HKT dengan alat dan/atau perangkat non-HKT.
- (5) CEIR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk pertama kali disediakan oleh Penyelenggara secara bersama-sama dengan kontribusi biaya masing-masing Penyelenggara dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah pelanggan aktif Penyelenggara.
- (6) CEIR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihibahkan kepada dan dikelola, dioperasikan serta dikendalikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dengan biaya pemeliharaan dan perawatan dibebankan kepada Penyelenggara untuk 2 (dua) tahun pertama.
- (7) Seluruh sistem dan perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar kinerja dan operasi paling rendah sesuai dengan standar ISO/IEC 27001 untuk keamanan informasi dalam pengelolaan data.

Pasal 3

- (1) Setiap Penyelenggara wajib melakukan verifikasi IMEI Alat dan/atau Perangkat HKT melalui EIR ke CEIR sebelum memberikan Akses Jaringan Bergerak Seluler.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan identifikasi IMEI Alat dan/atau Perangkat HKT oleh CEIR terhadap data Tanda Pendaftaran Produk yang dikelola kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

- (3) Selain data Tanda Pendaftaran Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal diperlukan, identifikasi IMEI Alat dan/atau Perangkat HKT oleh CEIR dapat juga dilakukan terhadap data IMEI Internasional.
- (4) IMEI Alat dan/atau Perangkat HKT yang telah diverifikasi disimpan sebagai Daftar Putih yang merupakan basis data triplet berupa IMEI, IMSI dan MSISDN di CEIR dan EIR masing-masing Penyelenggara.
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Pengguna HKT dengan kartu *Subscriber Identification Module* negara asing (*inbound roamer*) yang menggunakan layanan jelajah roaming internasional.

Pasal 4

Penyelenggara wajib menyampaikan data ke CEIR meliputi:

- a. data triplet berupa IMEI, IMSI dan MSISDN Alat dan/atau Perangkat HKT yang tersambung aktif pada jaringan bergerak seluler Penyelenggara sampai dengan Peraturan Menteri ini berlaku; dan
- b. data IMEI Alat dan/atau Perangkat HKT yang tidak aktif namun pernah tersambung pada jaringan bergerak seluler Penyelenggara dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sebelum Peraturan Menteri ini berlaku.

Pasal 5

- (1) Pengguna HKT dapat mengajukan permohonan kepada Penyelenggara agar IMEI Alat dan/atau Perangkat HKT yang dilaporkan hilang dan/atau dicuri untuk dikeluarkan dari Daftar Putih atau Daftar Abu-abu dan dimasukkan ke dalam Daftar Hitam.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan laporan kehilangan dan/atau kecurian dari aparat penegak hukum yang berwenang.

- (3) Dalam hal Alat dan/atau Perangkat HKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditemukan kembali, Pengguna HKT dapat mengajukan permohonan kepada Penyelenggara untuk mengeluarkan IMEI dari Daftar Hitam dan memasukkan kembali ke dalam Daftar Putih atau Daftar Abu-abu.

Pasal 6

- (1) Penyelenggara wajib memberikan Akses Jaringan Bergerak Seluler bagi Alat dan/atau Perangkat HKT dengan IMEI yang terdapat dalam Daftar Putih sebagai berikut:
 - a. Alat dan/atau Perangkat HKT dengan IMEI yang telah terverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4);
 - b. Alat dan/atau Perangkat HKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - c. Alat dan/atau Perangkat HKT yang menggunakan layanan jelajah internasional (*international roaming*);
 - d. Alat dan/atau Perangkat HKT milik pribadi penumpang dan/atau awak sarana pengangkut dengan jumlah paling banyak 2 (dua) Perangkat HKT per orang; dan
 - e. Alat dan/atau Perangkat HKT yang merupakan barang kiriman dengan jumlah paling banyak 2 (dua) perangkat per pengiriman;
 - f. Alat dan/atau Perangkat HKT milik perwakilan negara asing dan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - g. Alat dan/atau Perangkat HKT yang diimpor melalui, diproduksi dan/atau diedarkan di dan dari wilayah bebas pajak (*Free Trade Zone*).

- (2) Selain Daftar Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Alat dan/atau Perangkat HKT yang dapat diberikan Akses Jaringan Bergerak Seluler adalah Alat dan/atau Perangkat HKT dengan IMEI yang terdapat dalam Daftar Abu-abu sebagai berikut:
- a. Alat dan/atau Perangkat HKT wisatawan asing yang menggunakan nomor MSISDN dan IMSI Penyelenggara dengan masa aktif paling lama 90 (sembilan puluh) hari; dan
 - b. Alat dan/atau Perangkat HKT lainnya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 7

Penyelenggara wajib melakukan pembatasan Akses Jaringan Bergerak Seluler bagi Alat dan/atau Perangkat HKT sebagai berikut:

- a. Alat dan/atau Perangkat HKT dengan IMEI yang tidak memenuhi ketentuan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. Alat dan/atau Perangkat HKT dengan IMEI yang masuk dalam Daftar Hitam; dan
- c. Alat dan/atau Perangkat HKT dengan IMEI yang dimohonkan pembatasan oleh Instansi Pemerintah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penyelenggara wajib memberikan layanan pelanggan (*customer care*) kepada Pengguna HKT paling sedikit sebagai berikut:
- a. layanan informasi mengenai status IMEI Alat dan/atau Perangkat HKT yang mengacu pada basis data masing-masing Penyelenggara;
 - b. layanan pengaduan kehilangan, kecurian dan/atau tindak kejahatan lainnya yang berkaitan dengan Alat dan/atau Perangkat HKT;

- c. layanan pelaporan ditemukannya kembali Alat dan/atau Perangkat HKT yang hilang atau dicuri; dan
 - d. layanan lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Penyelenggara meneruskan pengaduan dan/atau pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c kepada CEIR.

Pasal 9

- (1) Data triplet berupa IMEI, IMSI, dan MSISDN yang berada di CEIR merupakan milik Pemerintah yang bersifat rahasia.
- (2) Instansi Pemerintah dan Penyelenggara yang memiliki akses terhadap data triplet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjamin kerahasiaan data dan informasi yang dikirim dari CEIR atau ke CEIR.
- (3) Penyelenggara berhak mendapatkan laporan dan *audit trail* dari CEIR terkait dengan sinkronisasi CEIR dan EIR setiap 3 (tiga) bulan.
- (4) Pusat data CEIR dan EIR harus berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 10

Ketentuan teknis pemberian akses dan pembatasan Akses Jaringan Bergerak Seluler terhadap Alat dan/atau Perangkat HKT melalui identifikasi *International Mobile Equipment Identity* ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB III SOSIALISASI

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pengendalian Alat dan/atau Perangkat HKT yang tersambung ke jaringan bergerak seluler melalui Identifikasi IMEI wajib dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat.

- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian terkait sesuai dengan kewenangannya dan bekerjasama dengan Penyelenggara serta pelaku usaha yang terkait.
- (3) Kementerian terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan; dan
 - d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui tatap muka, media cetak, media elektronik, sosial media dan media lainnya yang dianggap perlu.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

Menteri dapat mengakses dan menggunakan data triplet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Pasal 13

Menteri melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Penyelenggara dalam melaksanakan pengendalian Alat dan/atau Perangkat HKT yang tersambung ke jaringan bergerak seluler melalui identifikasi IMEI.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Alat dan/atau Perangkat HKT yang telah tersambung dengan jaringan bergerak seluler Penyelenggara sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tetap diberikan Akses Jaringan Bergerak Seluler.
- (2) Alat dan/atau Perangkat HKT yang tidak diberikan Akses Jaringan Bergerak Seluler setelah Peraturan Menteri ini berlaku, dapat mengajukan permohonan pemberian Akses Jaringan Bergerak Seluler melalui layanan pelanggan (*customer care*) Penyelenggara, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Alat dan/atau Perangkat HKT telah dimiliki oleh orang-perorangan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku; dan
 - b. permohonan pemberian Akses Jaringan Bergerak Seluler diajukan paling lambat 31 Agustus 2020.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi *International Mobile Equipment Identity* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1238), ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2020

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOHNNY G. PLATE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 376

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Komunikasi dan Informatika



Ditandatangani secara elektronik
oleh:
KEPALA BIRO HUKUM
Bertiana Sari



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM BASIS DATA IDENTITAS PERANGKAT TELEKOMUNIKASI BERGERAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengidentifikasi produk perangkat telekomunikasi bergerak yang diproduksi dan beredar di Indonesia, perlu membentuk sistem basis data identifikasi perangkat telekomunikasi bergerak secara nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Sistem Basis Data Identitas Perangkat Telekomunikasi Bergerak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);

4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 108/PER/M-IND/11/2012 tentang Pendaftaran Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1200);
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG SISTEM BASIS DATA IDENTITAS PERANGKAT TELEKOMUNIKASI BERGERAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Informasi Basis Data Identifikasi Perangkat Telekomunikasi Bergerak Nasional yang selanjutnya disebut SIBINA adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi untuk melakukan analisis terhadap identitas Perangkat Telekomunikasi Bergerak yang diproduksi dan beredar di Indonesia.
2. Perangkat Telekomunikasi Bergerak adalah perangkat telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet yang berbasis seluler.
3. Identitas Perangkat Telekomunikasi Bergerak Internasional atau *International Mobile Equipment Identity* yang selanjutnya disingkat IMEI adalah identitas internasional yang terdiri dari 15 (lima belas) digit nomor desimal unik

untuk mengidentifikasi sebuah Perangkat Telekomunikasi Bergerak dalam jaringan bergerak seluler.

4. Tanda Pendaftaran Produk yang selanjutnya disingkat TPP adalah surat tanda pendaftaran untuk produk Perangkat Telekomunikasi Bergerak yang akan diproduksi atau diedarkan di dalam negeri.
5. Penyelenggara Layanan Seluler adalah penyelenggara layanan jaringan telekomunikasi bergerak seluler yang memiliki izin penyelenggaraan telekomunikasi.
6. Pengguna Layanan Seluler adalah pelanggan dan pemakai alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Bergerak yang tersambung ke jaringan telekomunikasi bergerak seluler.
7. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
8. Data Identitas Perangkat Telekomunikasi Bergerak Internasional yang selanjutnya disebut Data IMEI Internasional adalah kumpulan data IMEI yang disediakan oleh lembaga internasional yang menerbitkan IMEI.
9. Basis Data IMEI Nasional adalah kumpulan data IMEI yang tersimpan didalam SIBINA dan dapat diakses secara elektronik.
10. Data Penyelenggara adalah data IMEI dan data pendukung yang disampaikan oleh Penyelenggara Layanan Seluler.
11. Daftar Putih adalah kumpulan data IMEI yang terdaftar sesuai dengan TPP dan sesuai dengan Data IMEI Internasional.
12. Daftar Notifikasi adalah kumpulan data IMEI yang tidak terdaftar sesuai dengan Basis Data IMEI Nasional untuk diproses lebih lanjut.

13. Daftar Hitam adalah kumpulan data IMEI yang terdaftar sebagai Daftar Notifikasi dan tidak diklarifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Sekretaris Jenderal adalah sekretaris jenderal yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian.
15. Kepala Pusat Data dan Informasi adalah kepala pusat yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan melaksanakan pembinaan dan pengelolaan data dan sistem informasi, manajemen data, serta pengembangan.

Pasal 2

- (1) Pembentukan SIBINA bertujuan untuk mengelola dan menyediakan Basis Data IMEI dari Perangkat Telekomunikasi Bergerak yang beredar di Indonesia.
- (2) Untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SIBINA melakukan:
 - a. pengumpulan data IMEI dari SIINas;
 - b. pengolahan data IMEI; dan
 - c. penyajian data IMEI.

Pasal 3

- (1) Data IMEI yang dikumpulkan dari SIINas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan data pendaftaran Perangkat Telekomunikasi Bergerak sesuai TPP.
- (2) Data IMEI dari SIINas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sebagai Basis Data IMEI Nasional.
- (3) Pendaftaran dan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pengolahan data IMEI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan dengan menganalisis Data Penyelenggara berdasarkan Basis Data IMEI Nasional dan Data IMEI Internasional.
- (2) Pengolahan data IMEI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala.

Pasal 5

- (1) Data Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berupa data dari Perangkat Telekomunikasi Bergerak yang beroperasi pada jaringan seluler.
- (2) Penyampaian Data Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi.

Pasal 6

- (1) Pengolahan data IMEI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menghasilkan:
 - a. Daftar Putih; dan
 - b. Daftar Notifikasi.
- (2) Daftar Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimutakhirkan ke dalam Basis Data IMEI Nasional.
- (3) Daftar Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) disampaikan kepada Penyelenggara Layanan Seluler untuk disampaikan kepada Pengguna Layanan Seluler.
- (4) Pengguna Layanan Seluler melakukan klarifikasi terhadap Daftar Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui SIBINA dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak penyampaian Daftar Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pengguna Layanan Seluler melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui instansi terkait.

- (6) Pelaksanaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan melalui ketentuan yang ditetapkan oleh masing-masing instansi terkait.

Pasal 7

- (1) IMEI yang masuk dalam Daftar Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan tidak memenuhi ketentuan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dimasukkan ke dalam Daftar Hitam.
- (2) Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Penyelenggara Layanan Seluler untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan sebagaimana diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan komunikasi.

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan penyajian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, Pengguna Layanan Seluler dapat melakukan verifikasi terhadap IMEI dari Perangkat Telekomunikasi Seluler yang dikuasai.
- (2) Verifikasi oleh Pengguna Layanan Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui SIBINA.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menganalisis data IMEI dari Pengguna Layanan Seluler dengan Basis Data IMEI Nasional.

Pasal 9

- (1) Sekretaris Jenderal menyelenggarakan SIBINA.
- (2) Dalam penyelenggaraan SIBINA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Jenderal melakukan tugas pemeliharaan dan pengembangan sistem serta pengolahan Basis Data IMEI Nasional.
- (3) Sekretaris Jenderal melimpahkan tugas pemeliharaan dan pengembangan sistem serta pengolahan Basis Data IMEI Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Pusat Data dan Informasi.

- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Jenderal dapat melibatkan perwakilan dari kementerian/lembaga terkait dan/atau pakar sesuai kompetensinya.

Pasal 10

- (1) Dalam hal diperlukan, Sekretaris Jenderal dapat memberikan akses terhadap informasi data IMEI yang tercantum dalam SIBINA kepada kementerian/lembaga.
- (2) Pemberian akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari paling rendah pejabat setingkat Eselon I/pimpinan tinggi madya pada kementerian/lembaga yang bersangkutan kepada Sekretaris Jenderal.
- (3) Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh Sekretaris Jenderal.
- (4) Pemberian akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didokumentasikan di dalam SIBINA.

Pasal 11

- (1) Sekretaris Jenderal melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan SIBINA.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri tiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2019

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1230

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Feby Setyo Hariyono



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 78 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR
38 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN PETUNJUK PENGGUNAAN DAN
JAMINAN LAYANAN PURNA JUAL BAGI PRODUK ELEKTRONIKA DAN
PRODUK TELEMATIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin perlindungan konsumen terhadap informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan produk telematika khususnya telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet melalui identifikasi *international mobile equipment identity*, perlu menyempurnakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual bagi Produk Elektronik dan Produk Telematika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual bagi Produk Elektronik dan Produk Telematika;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85/M-DAG/PER/12/2016 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2007);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 625);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN PETUNJUK PENGGUNAAN DAN JAMINAN LAYANAN PURNA JUAL BAGI PRODUK ELEKTRONIKA DAN PRODUK TELEMATIKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual bagi Produk Elektronik dan Produk Telematika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 625) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan di antara angka 13 dan angka 14 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 13a dan angka 13b sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Produk Elektronik adalah produk elektronik yang ditujukan untuk dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh Konsumen.
2. Produk Telematika adalah produk dari kelompok industri perangkat keras telekomunikasi dan pendukungnya, industri perangkat penyiaran dan pendukungnya, industri komputer dan peralatannya, industri perangkat lunak dan konten multimedia, serta industri kreatif teknologi informasi dan komunikasi.
3. Konsumen adalah setiap orang pemakai Produk Elektronik dan/atau Produk Telematika yang tersedia di masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
4. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.

5. Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan, lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
6. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
7. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
8. Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor Produk Elektronika dan Produk Telematika.
9. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi Produk Elektronika dan Produk Telematika di dalam negeri.
10. Petunjuk Penggunaan dalam Bahasa Indonesia yang selanjutnya disebut Petunjuk Penggunaan adalah keterangan dalam Bahasa Indonesia tentang cara menggunakan Produk Elektronika dan Produk Telematika dalam bentuk buku dan/atau lembaran.
11. Kartu Jaminan Purna Jual dalam Bahasa Indonesia yang selanjutnya disebut Kartu Jaminan adalah kartu yang menyatakan adanya jaminan ketersediaan suku cadang serta fasilitas dan pelayanan purna jual Produk Elektronika dan Produk Telematika dalam Bahasa Indonesia.
12. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan

oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.

13. Tanda Pendaftaran adalah dokumen sebagai tanda bukti yang menerangkan bahwa Petunjuk Penggunaan dan Kartu Jaminan atas Produk Elektronika dan Produk Telematika telah didaftarkan kepada pejabat berwenang di Kementerian Perdagangan.
- 13a. *International Mobile Equipment Identity* yang selanjutnya disingkat IMEI adalah nomor identitas internasional yang terdiri dari 15 (lima belas) digit, dihasilkan dari 8 (delapan) digit *Type Allocation Code* yang dialokasikan oleh *Global System for Mobile Association* untuk mengidentifikasi secara unik alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang tersambung ke jaringan bergerak seluler.
- 13b. *Subscriber Identification Module* yang selanjutnya disingkat SIM adalah rangkaian terintegrasi (*integrated circuit*) yang bertujuan untuk menyimpan nomor Pelanggan dan *International Mobile Subscriber Identity* (IMSI) yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengautentifikasi Pelanggan pada alat dan/atau perangkat telekomunikasi dalam jaringan telekomunikasi bergerak seluler.
14. Pusat Layanan Purna Jual adalah tempat Produsen atau Importir memberikan pelayanan kepada Konsumen setelah pembelian Produk Elektronika dan Produk Telematika, yang memiliki tenaga pelayanan pelanggan dan tenaga teknik yang kompeten, peralatan-peralatan kerja, piranti lunak (*software*), persediaan bagian, komponen, dan aksesoris yang diperlukan untuk penggantian, serta dokumen-dokumen teknik yang diperlukan untuk perawatan dan perbaikan.

15. Tempat Pengumpulan adalah tempat yang disediakan oleh Produsen atau Importir yang digunakan untuk mengumpulkan Produk Elektronika dan Produk Telematika yang akan diperbaiki untuk selanjutnya dikirim ke Pusat Layanan Purna Jual.
 16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
 17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.
 18. Direktur adalah Direktur Pemberdayaan Konsumen, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.
2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Produsen, Importir, dan Pelaku Usaha wajib menjamin IMEI teregistrasi dan tervalidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) IMEI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam label pada barang dan/atau kemasan terhadap telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet yang digunakan sebagai alat komunikasi berbasis SIM.
 - (3) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi agen, sub-agen, distributor, sub-distributor, dan pengecer.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 22 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf b1, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Produsen atau Importir wajib menarik Produk Elektronik dan Produk Telematika dari peredaran, dalam hal berdasarkan hasil pengawasan ditemukan:
 - a. Produk Elektronik dan Produk Telematika tidak dilengkapi Petunjuk Penggunaan dan Kartu Jaminan serta tidak mencantumkan nomor Tanda Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2);
 - b. Produk Elektronik dan Produk Telematika dilengkapi Petunjuk Penggunaan dan Kartu Jaminan tapi tidak memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2);
 - b1. IMEI pada telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A tidak teregistrasi dan tervalidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. Produk Elektronik dan Produk Telematika yang telah dilengkapi Petunjuk Penggunaan dan Kartu Jaminan yang terdaftar tapi pelaksanaan impornya dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Produsen dan Importir melakukan penarikan Barang dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan surat perintah Menteri.
- (3) Menteri memberikan mandat kewenangan penerbitan surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal.
- (4) Dalam hal identitas Produsen atau Importir tidak diketahui, penarikan Produk Elektronik dan

Produk Telematika dari peredaran dilakukan oleh Pelaku Usaha yang memperdagangkan.

- (5) Seluruh biaya penarikan Produk Elektronik dan Produk Telematika dari peredaran dibebankan kepada Produsen, Importir atau Pelaku Usaha.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Produsen, Importir, atau Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), Pasal 3A, Pasal 4 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dan/atau Pasal 22 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha oleh pejabat penerbit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Produsen, Importir, atau Pelaku Usaha dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menyampaikan rekomendasi pencabutan izin usaha kepada Lembaga OSS.
- (3) Pemberian rekomendasi pencabutan izin usaha, dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2019

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1239

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

